

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : MEI 2017

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018****BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2018. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2018 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RKP Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan dengan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, Politis, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2015;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
 29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Secara substansial, penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 berpedoman kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik 2005 – 2025.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
5. Keselarasan terhadap kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;

Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RKPD Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global antara lain Sustainable Development goal's (SDG's), Masyarakat Ekonomi Asean, Pembangunan Responsif Perubahan Iklim, Pengarustamaan Gender, Pro Poor Planning Budgeting and Monitoring, dan pelbagai isu strategis lainnya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyajian RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang: (1) arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, (2) arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan dari RKPD

1.5. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2018 untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama

bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Sedangkan tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2018 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- c. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah dengan memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan;
- d. Merumuskan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- e. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018;

- f. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

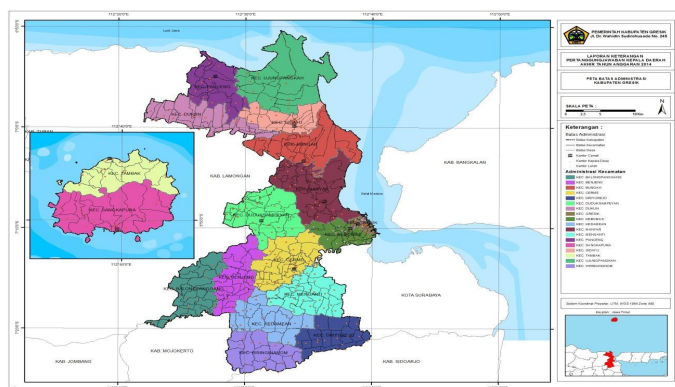
2.1.1.1 Aspek Geografis Kabupaten Gresik

a) Letak dan Kondisi Geografis

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data: Pwerda 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik
2010-2030

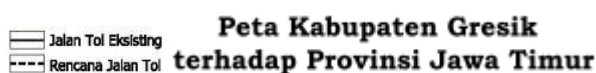
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 dimana Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber data: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031



Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah yang ada disekitarnya.

b) Topografi dan Fisiografi

Pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong.

Tabel 2.1

Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
		0 – 10	10 – 20	> 20	
		Meter dpl	Meter dpl	Meter dpl	
1	Wringinanom	0,00	6254,00	0,00	6262,00
2	Driyorejo	0,00	5130,00	0,00	5130,00
3	Kedamean	6588,00	0,00	0,00	6596,00
4	Menganti	6196,00	0,00	0,00	6367,00
5	Cerme	6126,00	0,00	0,00	6126,00
6	Benjeng	0,00	6862,00	0,00	6871,00
7	Balongpanggang	7167,00	0,00	0,00	7167,00
8	Duduksampeyan	7440,00	0,00	0,00	7449,00
9	Kebomas	2966,00	0,00	0,00	3433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8287,00	0,00	0,00	8671,00
12	Bungah	8022,00	0,00	0,00	7936,00
13	Sidayu	4521,00	0,00	0,00	4521,00
14	Dukun	5909,00	0,00	0,00	5909,00
15	Panceng	0,00	0,00	6318,00	6259,00

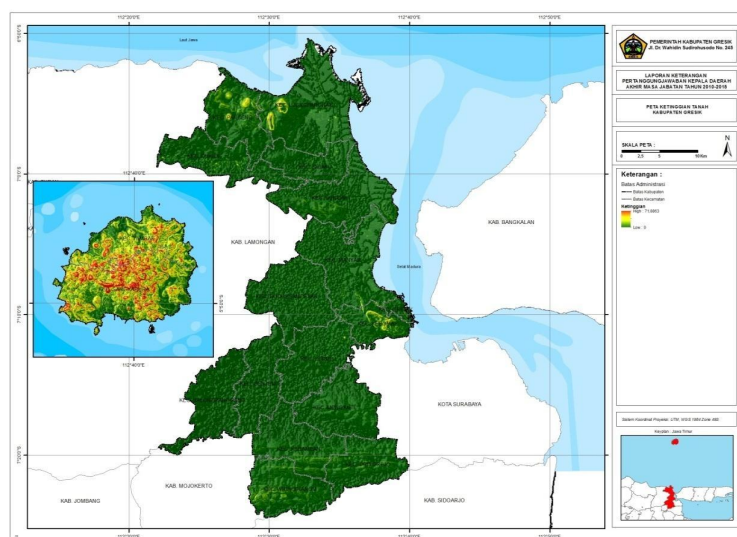
16	Ujungpangkah	9470,00	0,00	0,00	10406,00
17	Sangkapura	11872,00	0,00	0,00	11872,00
18	Tambak	7755,00	0,00	0,00	7739,00
	Jumlah	92843,00	18246,00	6318,00	119.513,00
	Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- o Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- o Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54 % .
- o Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik Tahun 2017

Gambar 2.3

Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang

mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit 1.072,23 ha atau sekitar 0,91 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan (Ha) Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Lereng				Jumlah
		0 - 2 %	3 - 15 %	16 - 40 %	>40 %	
1	Wringinanom	3968,00	2286,00	0,00	0,00	6262,00
2	Driyorejo	4680,00	450,00	0,00	0,00	5130,00
3	Kedamean	5684,00	904,00	0,00	0,00	6596,00
4	Menganti	6196,00	0,00	0,00	0,00	6367,00
5	Cerme	6126,00	0,00	0,00	0,00	6126,00
6	Benjeng	6862,00	0,00	0,00	0,00	6871,00
7	Balongpanggang	7167,00	0,00	0,00	0,00	7167,00
8	Duduksampeyan	7440,00	0,00	0,00	0,00	7449,00
9	Kebomas	2409,00	518,00	39,00	0,00	3433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8197,00	90,00	0,00	0,00	8671,00
12	Bungah	8022,00	0,00	0,00	0,00	7936,00
13	Sidayu	4521,00	0,00	0,00	0,00	4521,00
14	Dukun	5909,00	0,00	0,00	0,00	5909,00
15	Panceng	3897,00	2324,00	72,00	25,00	6259,00
16	Ujungpangkah	8063,00	972,00	243,00	192,00	10406,00
17	Sangkapura	4805,00	2050,34	4216,68	799,98	11872,00
18	Tambak	143,00	2656,94	4899,81	55,25	7739,00
Jumlah		94613,0	12251,28	9470,49	1072,23	119.513,00
Prosentase		80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

c) Hidrologi

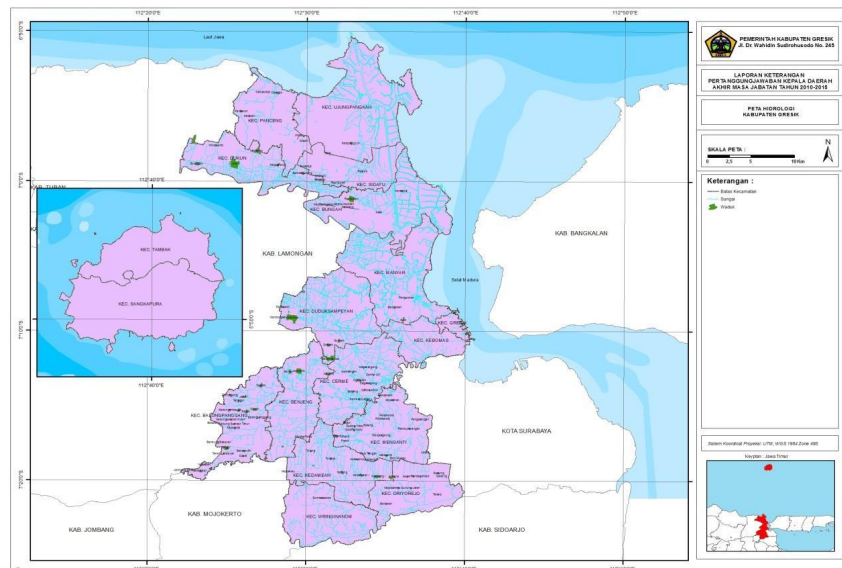
Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.

Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan

unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kabupaten Gresik



Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik Tahun 2015

d) Klimatologi

Seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembapan udara rata-rata 2.245 mm per tahun.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

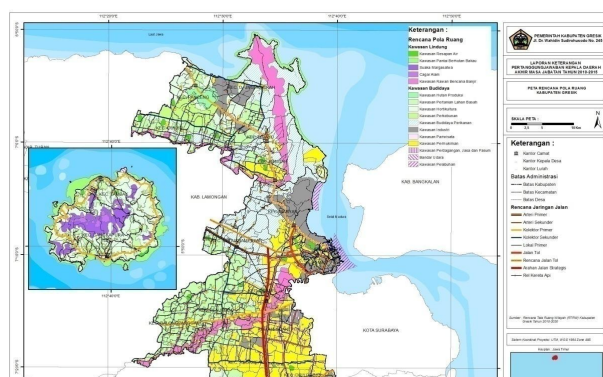
- musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;
- musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

e) Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- Kawasan peruntukan hutan produksi 1.017 hektar;
- Kawasan peruntukan pertanian 42.831,843 hektar;
- Kawasan peruntukan perikanan 21.678,358 hektar;
- Kawasan peruntukan pertambangan 817.249 hektar;
- Kawasan peruntukan industri 12.448,026 hektar;
- Kawasan peuntukan peristiwa 82.851 hektar;
- Kawasan peruntukan permukiman 26.097,091 hektar;
- Kawasan andalan 8.555 hektar;
- Kawasan peruntukan lainnya 6.644,010 hektar.

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

Gambar 2.5

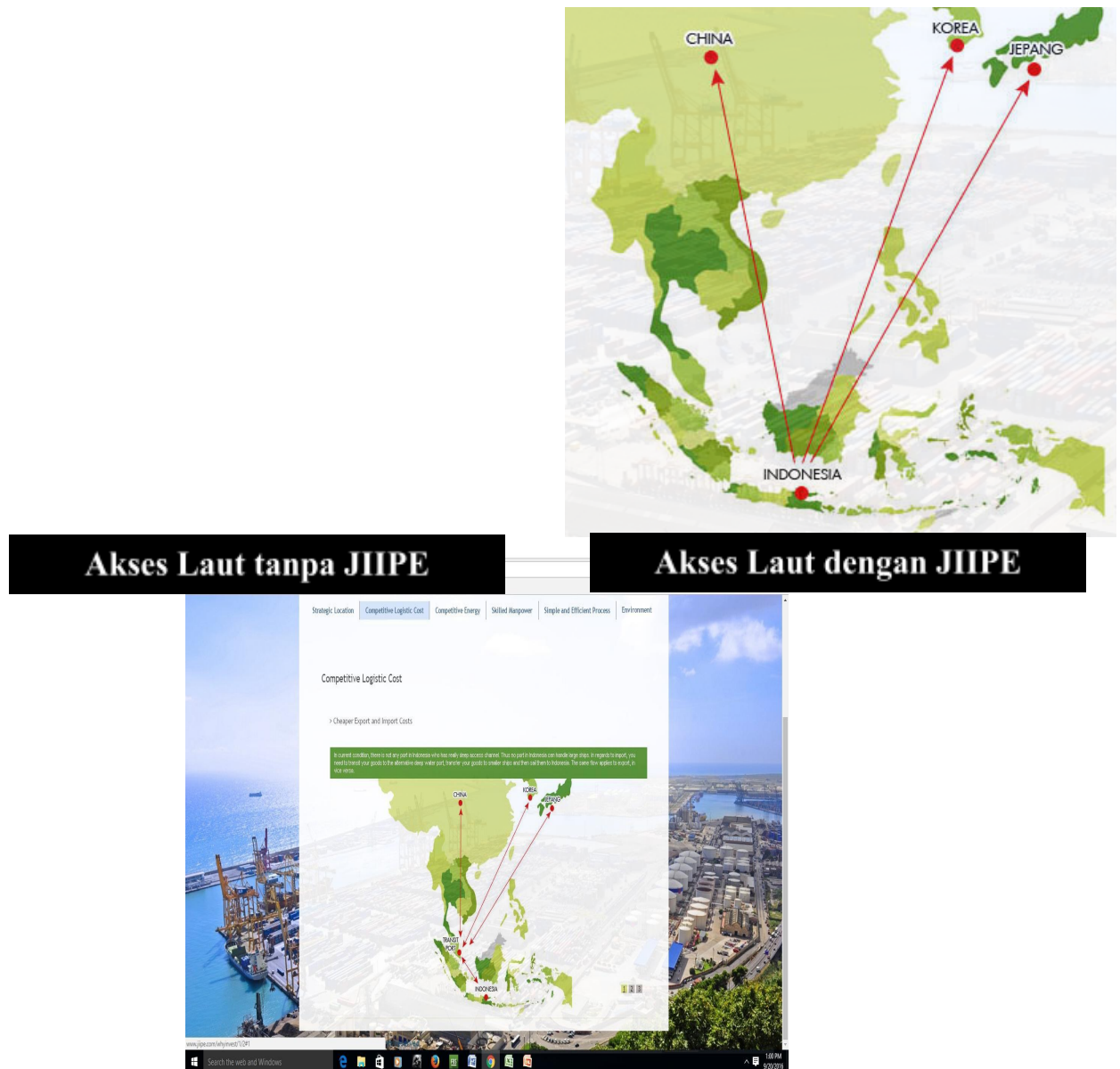
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik

f) Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah meliputi potensi investasi yang didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah, potensi wisata berbasis religius, dan potensi lainnya seperti hasil pertanian pangan, hortikultura, maupun peternakan. Daya ungkit pembangunan Gresik dalam tataran nasional dirumuskan sebagai bagian dari agenda pembangunan Jawa Bali (RPJMN 2014-2019). Cluster ini merupakan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja. Kondisi tersebut sesuai dengan pengembangan Kabupaten Gresik di level Regional Provinsi Jawa Timur sebagai bagian pusat pertumbuhan wilayah Cluster Surabaya Metropolitan Area yang terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.

Di sisi konektivitas daerah, kawasan industri di Gresik di design terhubung dengan sistem logistik nasional baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Sebagaimana contoh dalam pengembangan kawasan Java Integrated Industry Port and Estate (JIPE) di Manyar, Gresik. Akses logistik kompetitif dan lokasi strategis JIPE sebagai pelabuhan laut dalam pertama di Indonesia akan membuka jalur perdagangan langsung dengan mayoritas kekuatan ekonomi di Asia Pasifik. Akses luas tersebut

merupakan sebuah peluang besar Gresik untuk menjadi jembatan Indonesia Timur dan Barat terutama dalam produksi manufaktur. Dengan adanya JIPE sebagai transit port dan juga merupakan akses jalur perdagangan melalui laut ke China, Korea dan Jepang yang dlam hal ini bisa lebih efsien dan memangkas biaya transportasi karena tidak memerlukan transit di Singapura..



Gambar 2.6

Perbandingan Akses Laut Jalur Perdagangan

Sumber data: JIPE Tahun 2017

Keberadaan JIPE dengan akses laut berkapasitas -16 lws mampu melayani kapal-kapal besar sehingga tidak lagi dibutuhkan transit dan harga logistic pun menjadi lebih kompetitif. Kondisi eksisting saat ini, lokasi JIPE berjarak 55 Km dari Bandara Internasional Juanda didukung dengan akses darat yaitu Jalan Nasional Daendels yang kemudian terhubung dengan Tol Bunder.

Berkenaan dengan kemantapan infrastruktur, dalam peningkatan investasi melalui pengembangan industri manufaktur dan sektor lainnya dibutuhkan fasilitas untuk memenuhi proses produksi seperti pemenuhan kebutuhan bahan baku air ataupun listrik. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan bahan baku air industri di kawasan industri seperti JIPE telah disiapkan Water Treatment Plant Capacity dengan kapasitas 1500 m³/s sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air baku industri di Gresik telah dibangun Bendung Gerak Sembayat dengan kapasitas penyimpanan hingga 7 juta m³ dan potensi pemenuhan kebutuhan air untuk industri mencapai 0,619 m³/s. Adapun kebutuhan listrik dipenuhi melalui keberadaan Pembangkit Listrik Jawa Bali yang berada di Gresik dengan kapasitas 2.218 MW serta produksi setiap tahun untuk membangkitkan energi listrik rata-rata 12.814 GWh yang disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV ke sistem interkoneksi Jawa, dan Bali. Selain, kemantapan pasokan air dan listrik, potensi minyak dan gas bumi di Gresik juga melimpah dengan produksi minyak dan kondensate mencapai 18-19% total produksi Jawa Timur atau sekitar 3.94 Juta Barel per tahun.

Selain JIPE, konektivitas daerah melalui jalur pelabuhan ditunjang oleh 1 (satu) pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk kepentingan

sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik memiliki peranan penting untuk mendukung akses penyediaan bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik. Adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
4. Terminal Khusus PT. PLN PJB 2 Gresik
5. Terminal Khusus PT. Pertamina
6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
7. Terminal Khusus PT. Smelthing
8. Terminal Khusus PT. Maspion

g) Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal yang meliputi bencana banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung dan tanah longsor.

a. **Bencana Banjir**

Bencana banjir merupakan bencana yang terjadi hamper setiap tahun di Kabupaten Gresik yang disebabkan luapan sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Data banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik Tahun 2011 s/d 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Bencana Banjir Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Tahun	Lokasi Banjir	Dampak
1	2	3

2011	Balongpanggang, Cerme, Benjeng, Kedamean, Lundo Kec. Benjeng	Rumah dan Lahan Persawahan
2012	Ds.Lundo dan Delik Sumber Kec. Benjeng, Desa Tirem Kec. Dukun	Sawah = 115 Ha, Jalan Desa = 1500 m, 100 Rumah
2013	Desa Wotansari, Desa Kedungpring, Desa Pucung, Desa Sekarputih, Desa Wahas, Desa Dapet, Desa Bl.Panggang, Desa Jombang Delik, Desa Banjaragung, Desa Brangkal, Desa Karangsemanding, Desa Ngasin, Kec. Bl. Panggang Desa Lundo, Desa Balungtungjung, Desa Balungmojo, Desa Sedapurklagen, Desa Deliksumber, Desa Kedungrukem, Desa Munggugianti, Desa Bengkelor, Desa Gluranploso, Desa Bulurejo, Desa Dermo, Desa Kedungsekar, Desa Klampok, Desa Sirnobojo, Desa Kalipadang, Desa Karangan Kidul, Desa munggugebang, Desa Banter, Kec. Benjeng, Desa Gadingwatu, Desa Pranti, Desa Boteng, Desa Boboh, Desa Beton, Desa Hendrosari, Desa Sidowungu, Desa Kepatihan, Desa Setro, Desa Laban, Desa Mojotengah, Desa Menganti, Desa Bringkang, Desa Putatlor, Kec. Menganti, Desa Cermen, Desa Glindah. Kedamean, Desa Morowudi, Desa Sukoanyar, Desa Ngembung, Desa Guranganyar, Desa Dadapkuning, Desa Dampaan, Desa Lengkong, Desa Dooroo, Desa Dungus, Desa Iker-Iker Geger, Desa Betiting, Desa Cerme Kidul, Desa Cerme Lor, Desa Tambak Beras Kec. Cerme, Desa Morobakung, Desa Pejangganan, Desa Ngampel, Kec. Manyar, Desa Randuboto, Kec. Sidayu, Desa Ngawen, Desa Srowo, Desa Sedagaran, Desa Mriyunan, Desa Mojoasem, Desa Racikulon, Kec. Manyar, Desa Bungah, Desa Sukorejo, Desa Sukowati, Desa Melirang, Desa Mojopurogede, Desa Mojopurowetan, Desa Bedaten, Desa Indrodelik, Desa Masangan, Desa Sidorejo, Desa Sungonlegowo, Desa Sidomukti, Kec. Bungah, Desa Teremenggal, Desa Madumulyorejo, Desa Jrebeg, Desa Sekargadung, Desa Dukuanyar, Desa Gedong, Desa Kalirejo, Desa Karangcangkring, Desa Bangeran, Desa Bulangan	Rumah = 13.618 Jalan Desa = 76.787 m Jalan Raya = 20.420 m Sawah = 5.196 Ha Tambak = 1.871 Ha Kerugian Rp. 1.477.300.000,-
2014	Banjaragung; Wotansari; Sekarputih; Kedungpring; Pucung; Karangsemanding; Balongpanggang (balongpanggang) Lundo; Balongmojo; Bulangkulon; Munggugianti; Kedungrukem; Deliksumber; Sedapurklagen;	6064 Rumah; Sawah = 2172 Ha; Jalan Desa = 34.850 m; Jalan Raya = 10.660 m

	Gluranploso; Bengkelolor; Bulurejo; Dermo; Klampok; Kedungsekar; Kalipadang; Karangankidul; Munggugebang; Banter (Benjeng) Boboh; (Menganti) Dadapkuning; Ngembung; Sukoanyar; Dampaan; Dooro; Guranganyar; Morowudi; Iker-iker Geger; Dungus; Lengkong; Pandu; Cerme Kidul (Cerme)	
2015	Kecamatan balongpanggang Desa Wotansari, Dapet, Kedungpring, Brangkal, Balongpanggang, Karangsemanding, dan Banjaragung Kecamatan Benjeng pada desa Lundo, Bulangkulon, Munggugianti, Kedungrukem, Deliksumber, Sedapurklagen, Gluranploso, Bulurejo, Dermo, Klampok, Sirnobojo, Kalipadang, Balungtung, Balungmojo, dan Munggugebang Kec. Kedamean pada desa Cermen, Glindah, Tulung, Lampah, dan Turirejo Kec. Menganti pada Desa Boboh, Gadingwatu, Putatlor, Pranti, Beton, Beringkang, Kepatihan, dan Hendrosari Kecamatan Cerme pada desa Dadapkuning, Ngembung, Sukoanyar, Dampaan, Dooro, Guranganyar, Morowudi, Iker-iker Geger, Dungus, Lengkong, Pandu, Cerme Kidul, Kandangan, Betiting, Gedang Kulud, Tambakberas, Padeg, dan Jono	Rumah = 6.335 Jumlah Jiwa = 18.600 Sawah(Ha) = 3.361 Tambak (Ha) = 850

Sumber : LKPJ Kabupaten Gresik Tahun 2016

b. **Bencana Kekeringan**

Bencana kekeringan di Kabupaten Gresik terjadi pada musim kemarau. Dalam rangka mengantisipasi dan menangani bencana kekeringan Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan lokasi darurat kekeringan. Adapun desa yang ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana kekeringan kategori kering kritis di Kabupaten Gresik tahun 2012 s/d tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Daftar Desa Yang Ditetapkan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana
Kekeringan Kategori Kering Kritis di Wilayah Kabupaten Gresik
Tahun 2012-2015

Tahun	Kecamatan	Desa
1	2	3
2012	Driyorejo	Wedoroanom,Mojosarirejo
	Wringinanom	Kesamben Kulon,Sembungan, Cermen,Katimoho
	Kedamean	Tulung, Glindah,Lampah,Turirejo
	Menganti	Pranti Beton
	Benjeng	Lundo, Balongtanjung, Balongmojo, Bulangkulon, Bengkelolor, Gluranploso, Munggugianti, Bulurejo, Kedungrukem, Sedapurklagen, Sirnobojo,Kalipadang, Karangankidul, Deliksumber, Dermo, Klampok, Kedungsekar, Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirambe, Munggugebang, Pundutrate
	Balongganggang	Brangkal, Dampet, Wotansari, Karangsemanding, Sekarputih ,Banjaragung, Pucung, Balongpanggang, Kedungpring
	Cerme	Dooro, Worowudi, Dampaan, Dadapkuning, Pandu, Lengkonng, Jono,Kandangan, Dungus, Gedangkulut, Kambingan, SukoAnyar
	Kebomas	Kedanyang, Kembangan, Gulomantung
	Duduk Sqmpeyan	Pandanani, Glanggang, Kemudi, Sumari, Kandangan, Tambakrejo, Kawisto Windu,Setrohadi, Wadak Lor, Kramat, Panjunan,W adak Kidul,GredeK
	Bungah	Pegundan, Kemangi, Gumeng,
	Sidayu	Ngawen, Mojoasem,Randuboto, Sidumulyo, Mriyun, Bunderan, Racikulon, Purwodadi, Asempapak, Srowo, Racitengah, Sedagaran
	Dukun	Karancangkring, Bangeran, Gedonggedo'an,Tebuwung,Baron, Babaksari, Padang Bandung, Kalirejo, Jrebeng, Sekargadung, Madumulyorejo, Babakbawo, Dukuhkembar, Tiremenggal, Bulangan
2014	Benjeng	Gluranploso, Munggugianti, Bulurejo, Kedungrukem, Deliksumber, Kalipadang, Karangankidul, Dermo, Klampok, Sirnobojo, Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirembe, Pundutrate, Munggugebang
	Cerme	Dooro, Dampaan, Pandu, Lengkonng, Jono, Kandangan, Dungus, Gedangkulut, Wedani
	Duduksampeyan	Petis benem, Sumari, Tambakrejo, Setrohadi, Kramat
	Kedamean	Cermen, Tulung, Lampah, Turirejo
	Balongpanggang	Kedungpring, Balongpanggang, Pacuh, Pucung
	Sidayu	Pengulu, Mojoasem, Randuboto, Racikulon, Srowo
	Bungah	Pegundan, Gumeng
2015	Benjeng	Gluranploso, Munggugianti, Bulurejo, Kedungrukem,

		Deliksumber, Kalipadang, Klampok, Sironoboyo, Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirembe, Pundutrate
	Cerme	Dampaan, Pandu, Lengkong, Jono, Kandangan, Dungus, Gedangkulud, Wedani
	Duduksampeyan	Betis Benen, Sumari, Tambakrejo, Setrohadi, Kramat Wadak Kidul
	Kedamean	Tulung, Lampah, Turirejo
	Balongpanggang	Kedungpring, Balongpanggang Pucung
	Sidayu	Pengulu, Mojoasem, Randuboto
	Bungah	Penggun dan Gumeng

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

c. **Kebakaran**

Bencana Kebakaran di Kabupaten Gresik merupakan bencana lokal. Data terjadinya kebakaran di Kabupaten Gresik tahun 2011 s/d tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Bencana Kebakaran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Tahun	Lokasi kebakaran	Kecamatan	Kerusakan/ Kerugian
1	2	3	4
2011	Ds. Wedani	Crème	1.100.500.000
	Tlogopatut	Gresik	
	Dsn Bandung sekaran sidokumpul	Gresik	
2012	Kel. Indro	Kebomas	1 (150.000.000)
	Tebuwung	Dukun	1 (75.000.000)
	Ds Klotok	Balongpanggang	1 (75.000.000)
	Mariyunan	Sidayu	1 (50.000.000)
	Roomo	Manyar	1 (250.000.000)
	Tebalo	Manyar	1 (650.000.000)
	Kel. Sidomoro	Kebomas	1 (100.000.000)
	Bulanga	Dukun	1 (100.000.000)
	Ds. Tebaloan	Duduksampean	1 (50.000.000)
	Balongpanggang	Balongpanggang	1 (700.000.000)
	Karangpoo	Gresik	1 (150.000.000)
	Dsn. Bidoyo Ds Beton	Menganti	1 (65.000.000)
	Ds Ketanen	Panceng	1 (300.000.000)

	Dsn sawaan Ds. Gedang kulud	Cerme	1 (200.000.000)
	Kel Indro	Kebomas	1 (150.000.000)
	Dsn sawaan Ds. Gedang kulud	Cerme	1 (200.000.000)
2013	Kel. Indro	Kebomas	3
	Ds Gedangkulud	Cerme	1
	ds Kalipadang	Benjeng	1
	Ds Kesamben kulon	Benjeng	1
	Ds Wonokerto	Dukun	1
	Ds Diponggo	Tambak	1
	Cerme kidul	Cerme	1
	Ds Dadapkuning	Cerme	1
	Ds lowayu	dukun	1
	Ds Pulopancian	Gresik	1
	Ds Turirejo	Kedamean	1
	Ds Kalirejo	Dukun	1
	Ds Klotok	Balongpanggang	1
	Ds Klotok	Balongpanggang	1
	Randuagung	Kebomas	1
	Ds Tumapel	Duduksampeyan	1
	Kel Pekelingan	Gresik	2
	Ds Turirejo	Kedamean	1
	Ds Menganti	Menganti	1
	Ds Deliksumber	Benjeng	1
2014	Ds Gadung	driyorejo	1 (150.000.000)
	Ds Sembung	Wringinanom	3 (1.014.500.000)
	Ds Sekarkurung	Kebomas	3 (150.000.000)
	Ds Watuagung	Bunga	1 (100.000.000)
	Kel Kroman	Gresik	6 (733.000.000)
	Ds Sumpat	Driyorejo	2 (150.000.000)
	Ds Bulurejo	Benjeng	2 (1000.000.000)
	ds Serah	Panceng	1 (60.000.000)
	Ds Sekarputih	Balongpanggang	1 (31.518.000)
	Ds Bangeran	Dukun	1 (155.000.000)
	Ds Panggakakulon	Ujungpangkah	1 (10.000.000)
	Ds Sidorukun	Gresik	1 (52.500.500)
2015	Pacuh	Balongpanggang	150000000
	sidogedung batu	Sangkapura	200000000
	Watestanjung	Wringinanom	50,000,000
	Jombang Delik	Balongpanggang	70,200,000
	Kalipadang	Benjeng	150,000,000
	Kedungpring	Balongpanggang	55,000,000
	Tlogobedah	Menganti	50,000,000

	Karangandong	Driyorejo	200,000,000
	Setro	Menganti	215,000,000
	Bedanten	Bungah	750,000,000
	Tanjungan	Driyorejo	40,000,000
	Radegansari	Driyorejo	250,000,000
	Mojopuro Gede	Bungah	300,000,000
	Pangkah wetan	Ujung Pangkah	200,000,000
	Menganti	Menganti	50,000,000
	Mojowuku	Kedamean	175,000,000
	Lampah	Kedamean	10,500,000
	Wringinanom	Wringinanom	-
	Gunung Teguh	Sangkapura	50,000,000
	Krikilan	Driyorejo	-

Sumber : BPBD Tahun 2011-2015

d. **Angin Puting Beliung**

Bencana puting beliung di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten selama tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Bencana Angin Puting Beliung Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2015

Tahun	Tempat Kejadian	Kecamatan	Kerusakan / Kerugian
1	2	3	4
2011	Desa Campurejo	Panceng	40 rumah, 1 Kantor Kec sidayu, 1 sekolah sidayu
	Ds. Lengkong	Cerme	
	Ds. Dungus	Cerme	
	Ds. Jombangdelik	Balongpanggang	
	Ds. Kramat	Bunga	
	Ds. Ngabetan	Cerme Lor	
	Ds Raci tengah	Sidayu	
	Ds. Lundo	Benjeng	
2012	Brangkal	Balongpa nggang	20 Rmh (50.000.000)
	Dsn. Dukuh	Balongpa nggang	
	Tanjung	Balongpa nggang	
	Ds Padeng	Crème	1(15.000.000)
2013	Desa Tanjungori	Tambak	1
	Desa Kedungrukem	Benjeng	16
	Desa Pacuh	Balongpa nggang	56

	Desa Mriyunan	Sidayu	1 Gedung Sekolah
	Desa Sukalela	Tambak	1
	Desa Lebaniwaras	Wringinanom	68
	Desa Wringinanom	Wringinanom	69
	Desa Mulyorejo	Dukun	1
	Dusun Sukoanyar	Cerme	1
	Dusun Pendem	Kedamean	71
	Desa Turirejo	Kedamean	11
	Desa Karangrejo	Ujungpang kah	10
	Desa Turirejo	Kedamean	1
	Desa Cerme Kidul	Cerme	1
	Desa Sumberwaru	Wringinanom	1
	Desa Turirejo	Kedamean	1
	Desa Kramat	Bungah	43
	Desa Dapet	Balongpa nggang	1
	Desa Kandangan	Duduksam peyan	2
	Desa tambakrejo	Duduksam peyan	3
	Desa Sumengko	Duduksam eyan	1
2014	Dsn Dapet	Balongpa nggang	1 (75.000.000)
	Dsn Jambu	Cerme	1 (30.000.000)
	Dsn Kemendung	Cerme	1 (30.000.000)
	Kelurahan Lumpur	Gresik	1 (40.000.000)
	Desa Pangkahkulon	Ujungpang kah	1 (25.000.000)
	Desa Dahanrejo	Kebomas	1 (10.000.000)
	Desa Dooro	Cerme	47 (186.400.000)
	Desa Sedapurklagen	Benjeng	1 (17.000.000)
	Desa Kalipadang	Benjeng	1 (50.000.000)
2015	Wedoroanom	Driyorejo	35.000.000,00
	Banyuurip	Kedamean	51.450.000,00
	Kesamben wetan	Driyorejo	50.000.000,00
	Kelurahan Sidomoro	Kebomas	60.000.000,00
	SMAN 1 Balongpanggang	Balongpanggang	30.000.000,00
	Mojowuku	Kedamean	22.500.000,00
	Tambak rejo	Duduk sampeyan	50.000.000,00

Sumber : BPBD Tahun 2011-2015

Penanganan Bencana Angin puting Beliung di Kab Gresik
antara lain:

1. Pendirian Posko Siaga Bencana;
2. Menyiapkan peralatan pemotongan untuk pohon tumbang;
3. Koordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait (Dinas PU.
BLH, PLN dan Telkom);

4. Survey lokasi saat terjadi Pasca Bencana;
5. Menindaklanjuti Proposal ganti rugi rumah yang tertimpa;
6. Pemberian paket sembako;
7. Memberikan paket kebutuhan pokok.

e. **Tanah Longsor**

Bencana Tanah longsor di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten selama tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Bencana Tanah Longsor Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Tahun	Tempat Kejadian	Kerusakan / Kerugian
1	2	3
2011	Tidak ada laporan kejadian	
2012	Desa Jono Desa Pandu, Kec. Cerme, Desa Tirem Enggal, Kec. Dukun.	Rp82.000.000
2013	Tidak ada laporan kejadian	
2014	Teluk Jati Dawang Kotakusuma; (Tambak) Sawahmulya; Gunungteguh; Daun; Balikterus ; Lebak (Sangkapura)	572 Rumah; Jalan Desa = 259 m; Jalan Raya = 600 m; Tanggul Jebol = 44; Jembatan = 4
2015	Kecamatan Kedamean	1 rumah

Sumber : BPBD Tahun 2011-2015

2.1.1.2 **Aspek Demografi Kabupaten Gresik**

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2016 sebanyak 1.310.439 jiwa yang terdiri dari 659,578 laki-laki dan 650.861 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2016 sebesar 1.100 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2015 sebesar 1:1,013. Adapun

rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Per Desember 2016						Luas Wilayah
		2015			2016			
		L	P	Total	L	P	Total	
1	DUKUN	33,826	33,317	67,143	34,181	33,563	67,744	59,03
2	BALONGPANGGANG	29,22	29,366	58,586	29,050	29,193	58,243	63,88
3	PANCENG	26,213	25,823	52,036	26,495	26,024	52,519	62,59
4	BENJENG	33,105	33,048	66,153	33,207	33,059	66,266	61,26
5	DUDUKSAMPEYAN	25,459	25,51	50,969	25,440	25,419	50,859	74,29
6	WRINGINANOM	36,382	35,968	72,35	36,674	36,170	72,844	62,62
7	UJUNGPANGKAH	25,538	25,378	50,916	25,771	25,465	51,236	94,82
8	KEDAMEAN	31,578	31,297	62,875	31,698	31,332	63,030	65,96
9	SIDAYU	21,946	21,622	43,568	22,074	21,773	43,847	47,13
10	MANYAR	56,475	54,73	111,205	57,314	55,548	112,862	95,42
11	CERME	39,232	39,251	78,483	39,263	39,070	78,333	71,73
12	BUNGAH	33,688	33,372	67,06	33,877	33,299	67,176	79,49
13	MENGANTI	61,035	59,898	120,933	61,749	60,499	122,248	68,71
14	KEBOMAS	52,371	51,321	103,692	53,316	52,340	105,656	30,06
15	DRIYOREJO	51,948	51,161	103,109	52,403	51,492	103,895	51,3
16	GRESIK	43,305	43,629	86,934	43,068	43,349	86,417	5,54
17	SANGKAPURA	34,855	34,796	69,651	34,817	34,464	69,281	118,72
18	TAMBAK	19,284	18,826	38,11	19,181	18,802	37,983	78,7
JUMLAH		655,46	648,313	1,303,773	659,578	650,861	1,310,439	1.191,25

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2017

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gresik dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yaitu Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan

Masyarakat, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Identifikasi terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah secara umum dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.

a) Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp81.359.363,3 atau mengalami peningkatan 6,1% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini selaras dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang mencapai Rp100.748.593,9 atau meningkat 6,9% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9

PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2014**	2015***	2014**	2015***
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	7 254 618	6 8 355 683	5 244 731	7 5 555 392
2.	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rupiah	11 463 102	3 8 585 516	8 531 409	3 9 038 143
3.	Industri Pengolahan	Juta Rupiah	45 213 679	2 49 471 079	37 263 961	9 39 282 970
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	Juta Rupiah	376 934	3 417 692	431 674	3 427 406
5.	Pengadaan Air, Penelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Juta Rupiah	56 577	8 62 525	47 060	0 49 394
6.	Konstruksi	Juta Rupiah	7 771 712	3 9 076 916	6 336 211	2 7 168 369
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta Rupiah	10 617 743	2 12 246 546	8 935 823	0 9 667 713
8.	Transportasi dan Pergudangan	Juta Rupiah	2 062 787	5 2 310 908	1 619 184	7 1 715 717
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rupiah	1 053 473	6 1 225 158	835 346	0 906 877
10.	Informasi dan Komunikasi	Juta Rupiah	3 221 708	5 3 681 136	3 131 927	1 3 336 441
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	Juta Rupiah	997 535	5 1 136 609	811 255	1 868 808
12.	Real Estate	Juta Rupiah	1 037 164	5 1 193 144	948 999	9 999 012
13.	Jasa Perusahaan	Juta Rupiah	245 394	8 271 488	199 106	1 212 705

14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rupiah	1 078 834	3 1 225 175	885 648	7 940 242
15.	Jasa Pendidikan	Juta Rupiah	751 311	5 830 811	616 608	9 660 264
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta Rupiah	332 793	2 371 780	282 845	0 303 011
17.	Jasa Lainnya	Juta Rupiah	249 683	3 286 419	214 879	7 226 891
	Jumlah	Juta Rupiah	93 785 054	5 100 748 593	76 336 672	81 359 363

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2016

Catatan: ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara

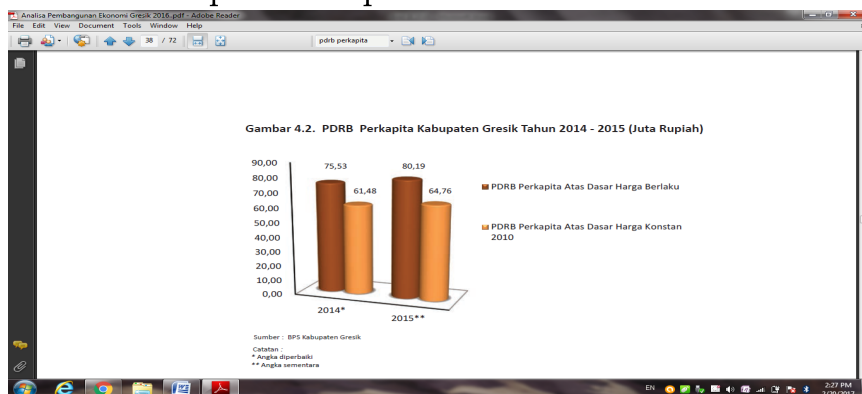
b) Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita dihitung dari besarnya PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita tidak bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk.

Namun demikian, PDRB perkapita masih cukup relevan untuk mengetahui apakah secara rata-rata pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak. Biasanya makin meningkat angka PDRB perkapita maka kemakmuran juga diharapkan makin tinggi.

Pada tahun 2015 PDRB perkapita Kabupaten Gresik jika dihitung berdasarkan PDRB atas harga berlaku diperkirakan sebesar 80,19 juta rupiah, sedangkan jika dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan 2000 sebesar 64,76 juta rupiah. Pada Gambar berikut dapat dilihat perkembangan angka PDRB perkapita atas harga berlaku dan atas harga konstan 2010 mulai Tahun 2014 hingga Tahun 2015.

Gambar 2.7
PDRB Perkapita Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2016

c) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun.

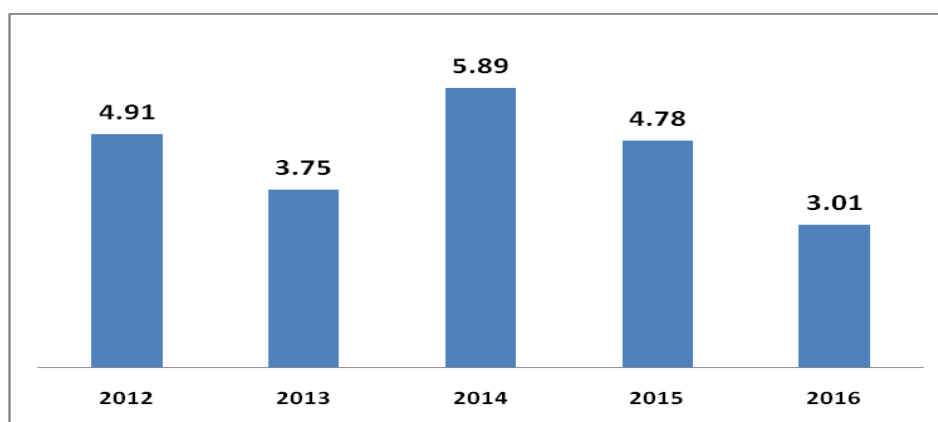
Berdasarkan publikasi BPS, Secara keseluruhan, hingga kuartal ke-3, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara year on year dari tahun 2015 yang mencapai 4,79% meningkat menjadi 5,04% pada tahun 2016. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai 6,58 %

d) **Laju Inflasi**

Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik pada tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 3.01 sedangkan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 5.89. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar Sebagai Berikut :

Gambar 2.8

Laju Inflasi Kab. Gresik Tahun 2011-2016



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2016

2.1.2.2 **Kesejahteraan Sosial**

2.2.2.1 **Pendidikan**

Pembangunan pendidikan Kabupaten Gresik telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan Kabupaten Gresik dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai

golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Meningkatnya Angka Ratarata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pembangunan pendidikan sebagaimana Realisasi Indikator yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2016

Indikator	2016	
	Target	Realisasi
Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98,88	98,62
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;	108,01	103,04
Angka Kelulusan (AL) SD dan Sederajat;	100%	100%
Angka Putus Sekolah (APtS) SD dan Sederajat	0,03	0,019
Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat	97.00%	98.15
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	86.75%	86.04
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	98.90%	101.41
Angka Kelulusan (AL) SMP sederajat	100%	100%
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP sederajat;	0.12%	0.09

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2016

2.2.2.2 **Kemiskinan.**

Tingkat Kemiskinan (PO) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara by name by address merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015. Penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Kemiskinan absolut pada tahun 2016 mencapai 28 juta penduduk sedangkan nilai kemiskinan relatif sebesar 10,9% dari total populasi. Kondisi ini mengalami penurunan yang tipis dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar 0,2 basis poin kemiskinan relatif dan sekitar 1 juta penduduk.

Kondisi ini selaras dengan pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik berdasarkan publikasi BPS mencapai 13,63 %meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan angka kemiskinan tidak diartikan sebagai penurunan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai factor penting seperti resesif ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta factor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

2.2.2.3 **Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)**

Tingkat partisipasi Kerja Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 mencapai 67,88 %, mengalami peningkatan sebesar 0,06 % dibandingkan tahun 2015 yang mencapai angka 67,84%. Dari 750.255 penduduk usia kerja pada kelompok umur 20-69 tahun berdasarkan capaian ini dinyatakan 508.973 jiwa berhasil diidentifikasi berpartisipasi pada dunia kerja. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal melalui Pengembangan dan perluasan informasi pasar kerja melalui “Gresik Job Fair” yang dilaksanakan rutin tiap Tahun. Pada Gresik Job Fair yang diadakan tahun 2016, jumlah perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 35 perusahaan baik yang termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan menawarkan 1500 peluang kerja; Pelatihan Berbasis Kompetensi disertai sertifikasi kompetensi tenaga kerja di UPT Pelatihan Kerja (BLK), didukung dengan implementasi Pola 3

in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan); Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui upgrading Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan; Pembinaan di sektor informal melalui pelatihan/pembinaan dan pendampingan usaha mandiri (wirausaha); dan memperbanyak program magang di perusahaan bagi peserta pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Sedangkan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selama tahun 2016 mencapai 88,54%. Dari 103 jumlah perselisihan hubungan industrial yang terjadi, dapat diselesaikan sebanyak 91 kasus.

2.2.2.4 Kelestarian Budaya dan olahraga

Persentase Kelestarian Cagar Budaya mencapai 100% dengan melestarikan 18 cagar budaya. **Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi** mencapai 43,33% diukur dari 346 pemuda yang dibina pada tahun 2016 sebanyak 145 pemuda berhasil meraih prestasi akademik dan non akademik. Prestasi yang diraih meliputi prestasi di bidang pengembangan kepribadian dan potensi diri sebanyak 16 pemuda dan prestasi di Bidang Olah Raga sebanyak 129 pemuda.

Tabel 2.11

Realisasi Kelestarian Budaya dan Olahraga Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	2016	
		Target	Realisasi
1	Persentase Kelestarian Budaya	100%	100% 18 Cagar Budaya yang dilestarikan
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	40-50%	43,33 % (145 Pemuda Berprestasi)

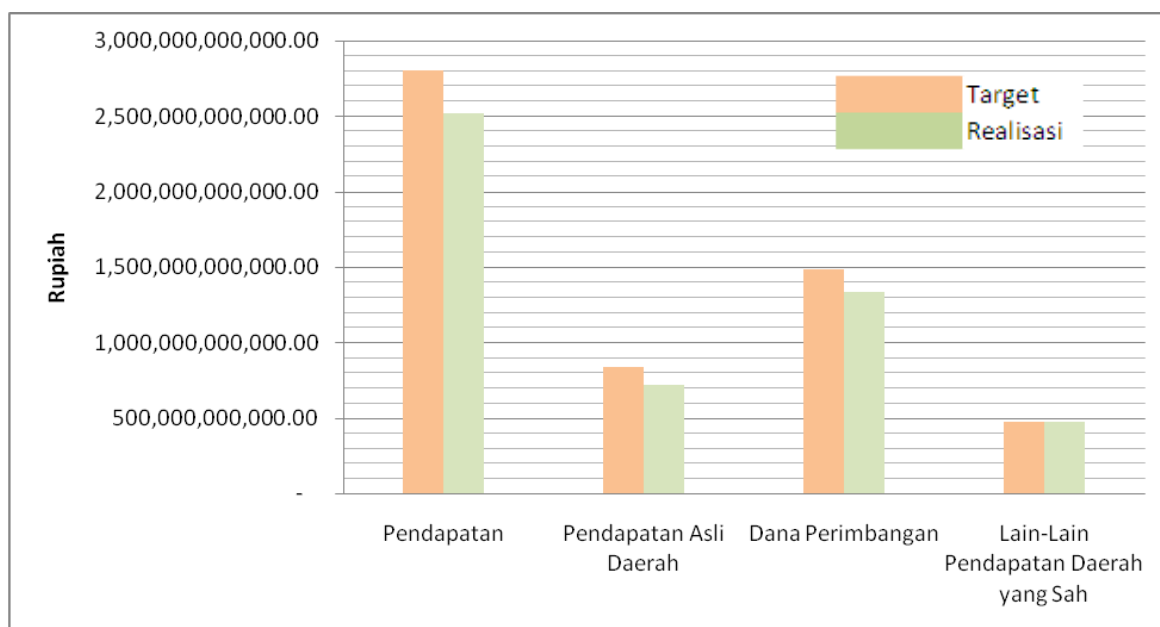
Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Gresik Tahun 2017

2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2.3.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp2.522.096.536.819,16 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 2.522.096.536.819,16 atau 90,12%, dengan rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.9

Grafik Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2016

Tabel 2.12

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Komposisi	Target	Realisasi	Rasio
Pendapatan	2.798.699.464.467,28	2.522.096.536.819,16	90,12%
Pendapatan Asli Daerah	836.440.666.433,28	715.501.281.841,16	85,54%
Dana Perimbangan	1.487.953.427.000,00	1.336.689.003.743,00	89,83%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	474.305.371.034,00	469.906.251.235,00	99,07%

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 mencapai Rp715.501.281.841,16 atau 85,54% memberikan kontribusi sebesar 28% dari total pendapatan, realisasi dana perimbangan mencapai Rp1.336.689.003.743,00 atau 89,83% memberikan kontribusi sebesar 53% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp469.906.251.235,00 atau 99,70% memberikan kontribusi sebesar 19% dari total pendapatan

2.2.3.2 Fokus infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur Kabupaten Gresik sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menarik investor, meningkatkan produksi dan memperlancar distribusi, hingga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, Ketersediaan infrastruktur merupakan modal yang penting terutama dalam menghadapi persaingan di tingkat regional dalam Perdagangan bebas dengan persaingan yang kompetitif di tingkat Asia Tenggara yang dibingkai dalam koridor Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Gresik yang mendukung daya saing Kabupaten Gresik antara lain:

- Jalan Lingkar dan Lapangan Terbang Perintis Pulau Bawean.
- Jalan Tol Surabaya – Gresik .
- Jalan Tol Surabaya – Mojokerto melewati wilayah Gresik.

- d. Jalan Nasional sebagai jalan Arteri primer (Surabaya – Gresik – Lamongan)
- e. Jalan Nasional sebagai jalan Kolektor Primer (Gresik – Sadang lewat Pantura / Jl. Daendels).
- f. Jalan Propinsi sebagai jalan Kolektor Primer (Legundi – Bunder, Lakarsantri – Bringkang, Wringinanom – Driyorejo – Surabaya).
- g. Tersedianya Air Bersih PDAM.
- h. Tersedianya Energi Listrik dan gas.
- i. Tersedianya 1 Pelabuhan Umum dan 7 Pelabuhan khusus.
- j. Bendung Gerak Sembayat.

Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Gresik, antara lain:

- a. Jalan Tol Gresik – Tuban.
- b. Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
- c. Jalan Lingkar Barat Surabaya.
- d. Pengembangan Air Bersih Untuk Kecamatan Kota dari sumber air Umbulan, untuk Wilayah Gresik Utara kebutuhan air baku/bersih dari Bendung Gerak Sembayat.
- e. Pengembangan penyediaan gas untuk wilayah perkotaan, Gresik Utara dan Gresik Selatan.
- f. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan.
- g. Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Kali Mireng.
- h. Rencana pembangunan TPA di wilayah Gresik Selatan dan Utara.
- i. Pengembangan Kawasan Perumahan Terpadu di Gresik Selatan.
- j. Penataan Kawasan Pesisir Terpadu.
- k. Stadion Bukit Lengis bertaraf Internasional.

Selain daya saing di bidang infrastruktur, Kabupaten Gresik juga memiliki keunggulan daya saing di bidang sosial budaya di Kabupaten Gresik, antara lain :

- 1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Gresik relatif tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur.

2. Potensi pariwisata yang khas seperti Pulau Bawean dan wisata Religi Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim ditunjang kondusifitas keamanan dan ketertiban sosial.
3. Tersedianya RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang termasuk Rumah Sakit Tipe B dengan seluruh instalasinya berstandar ISO, yang menjadi rujukan pasien di wilayah Pantura, ditunjang dengan 5 Rumah Sakit Swasta, 32 Puskesmas dan 77 Puskesmas Pembantu.

2.2.3.3 **Fokus iklim berinvestasi**

Dari sisi perencanaan penanaman modal terjadi penurunan minat investasi di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini seiring dengan ekonomi yang belum sepenuhnya membaik termasuk di Indonesia. Di tahun 2016, ekonomi masih mengalami pasang surut. Hal ini nampak pada arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan akan dilakukannya koreksi APBN dengan penurunan 2 (dua) tingkat. Hal ini adalah imbas dari perekonomian dunia, termasuk pula rencana investasi dalam negeri yang menurun menjadi 13.952.621,8 (dalam juta rupiah). Selanjutnya untuk rencana penanaman modal asing juga mengalami penurunan dari sebesar 46,6% (empat puluh enam koma enam persen) dari tahun 2015. Meski terjadi penurunan rencana investasi asing dan domestik namun realisasi investasi berkata sebaliknya. Terjadi kenaikan yang signifikan dengan tren positif atas realisasi penanaman modal asing maupun dalam negeri. Di sektor PMA, terjadi pertumbuhan realisasi investasi sebesar dari US ribu \$ 152,925.40 ribu menjadi US ribu \$ 348.001 atau setara dengan 127%. Realisasi rencana investasi Penanaman Modal Dalam Negeri juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 3.982.980,6 (dalam juta rupiah) dari angka 671.413,6 (dalam juta rupiah) di Tahun 2015. Hal ini mencerminkan masih tingginya minat investor yang menanamkan

modal di Kabupaten Gresik. Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2016

No.	Uraian	Satuan	2015	2016
1	Rencana Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	Juta Rupiah	24.639.278,4	13.952.621,8
2	Rencana Investasi Penanaman Modal Asing	US\$ ribu	398.273,6	212.764,9
3	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Juta Rupiah	671.413,6	3.982.980,6
4	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing	US\$ ribu	152.925,40	348.001

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Realisasi investasi Kabupaten Gresik tidak hanya dapat dihitung dari realisasi realisasi Izin Prinsip Penanaman Modal atau yang dikenal dengan Izin Usaha. Hal ini dikarenakan bahwa komponen realisasi investasi juga termasuk dari nilai investasi perdagangan, investasi usaha kecil, dan investasi masyarakat. Berikut disajikan tabel investasi perdagangan berdasarkan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

Tabel 2.14
Investasi berdasarkan Penerbitan SIUP

URAIAN	SATUAN	TAHUN	
		2015	2016
SIUP Mikro	SIUP	342	447
SIUP Kecil	SIUP	968	1372
SIUP Menengah	SIUP	290	350
SIUP Besar	SIUP	12	55
Nilai Investasi	(Rp Juta)	19.766,408	4.879.959,546

Investasi tahun sebelumnya	(Rp Juta)	6.936,522	19.766,408
----------------------------	-----------	-----------	------------

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Selain industri besar yang mendominasi wilayah Kabupaten Gresik, industri kecilpun banyak tumbuh di wilayah Gresik guna men-support keberadaan industri pengolahan. Menurut data penerbitan Tanda Daftar Industri, di tahun 2016 ini terdapat industri kecil baru sejumlah 194 buah sehingga total industri kecil di tahun 2016 menjadi 6.689 unit, seperti tampak di bawah ini:

Tabel 2.15
Penerbitan Tanda Daftar Industri

URAIAN	SATUAN	TAHUN	
		2015	2016
Industri Kecil	industri	6454	6495
Tanda Daftar Industri	unit	41	194
Investasi	Rp.(juta)		12.835

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Dilihat dari jumlahnya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan atas pertumbuhan industri kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2015, kenaikan pertumbuhan sampai pada angka 373%. Seiring dengan kenaikan tersebut, dari sisi investasi dapat dilihat bahwa nilai investasi industri kecil tersebut sejumlah Rp12.835.000.000 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Komponen investasi yang lain adalah investasi masyarakat dimana juga terdiri dari berbagai komponen. Terkait dengan tugas dan fungsi instansi, investasi masyarakat yang dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan investasi bangunan selain sektor industri di Tahun 2016 sebesar Rp. 29.076.367.625.000,- (dua puluh sembilan trilyun tujuh puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Di bidang pariwisata, destinasi pariwisata Kabupaten Gresik didominasi oleh situs atau peninggalan sejarah yang berciri khas religius yang menunjukkan Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali.

Wisata budaya religi Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Makam Maulana Malik Ibrahim (Kec. Gresik);
- b. Makam Sunan Giri (Kec. Kebomas);
- c. Makam Pusponegoro (Kec. Gresik);
- d. Makam Raden Santri (Kec. Gresik);
- e. Makam Nyai Ageng Pinatih (Kec. Gresik);
- f. Makam Sunan Prapen (Kec. Kebomas)
- g. Makam Siti Fatimah Binti Maimun (Kec. Manyar)
- h. Makam Kanjeng Sepuh (Kec. Sidayu)

Selain wisata budaya atau religius terdapat obyek wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain:

- a. Danau Kastoba (Kec. Tambak)
- b. Air Panas Kebondaya (Kec. Sangkapura)
- c. Telaga Ngipik/ Giri Wana Tirta (Kec. Kebomas)
- d. Bukit Surowiti (Kec. Panceng)
- e. Penangkaran Rusa Bawean (Kec. Sangkapura)
- f. Pantai Pulau Cina (Kec. Sangkapura)
- g. Air Terjun Patar Selamat (Kec. Sangkapura)
- h. Air Terjun Udhuk-udhuk (Kec. Tambak)
- i. Pantai Labuhan (Kec. Tambak)
- j. Pantai Nyimas (Kec. Sangkapura)
- k. Pantai Hutan Lindung (Kec. Sangkapura)
- l. Pantai Tinggen (Kec. Sangkapura)
- m. Pantai Dalegan (Kec. Panceng)
- n. Pulau Noko dan Pulau Gili (Kec. Sangkapura)
- o. Kawasan Pantai Selayar (Kec. Sangkapura)
- p. Air Terjun Laccar (Kec. Tambak)

2.2.3.4 **Fokus sumber daya manusia**

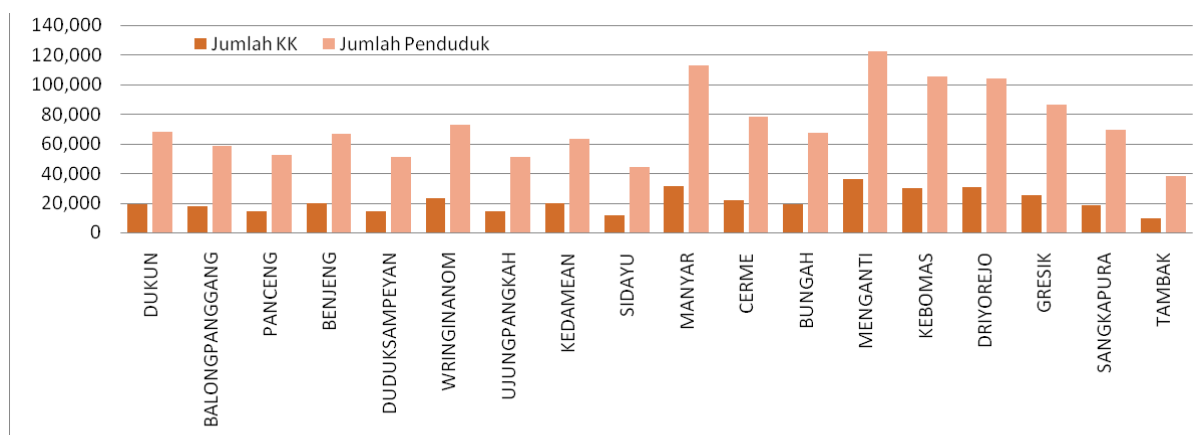
Jumlah penduduk Gresik tahun 2016 mengalami kenaikan 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 376.023 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebanyak 366,554 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 2.180 Keluarga atau 0,02%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2015	2016
1	DUKUN	26	18,632	19,209
2	BALONGPANGGANG	25	17,403	17,667
3	PANCENG	14	14,124	14,583
4	BENJENG	23	19,32	19,681
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14,02	14,306
6	WRINGINANOM	16	22,485	22,944
7	UJUNGPANGKAH	13	14,103	14,526
8	KEDAMEAN	15	19,159	19,493
9	SIDAYU	21	11,52	11,816
10	MANYAR	23	30,237	31,374
11	CERME	25	21,488	21,882
12	BUNGAH	22	18,346	18,819
13	MENGANTI	22	34,775	35,891
14	KEBOMAS	21	28,839	30,020
15	DRIYOREJO	16	29,787	30,583
16	GRESIK	21	24,478	25,006
17	SANGKAPURA	17	18,147	18,408
18	TAMBAK	13	9,691	9,815
JUMLAH		356	366,554	376,023

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.10
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2016

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2016, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 35.891KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 122,248 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.815 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 37.983 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur produktif (15-64 tahun) mendominasi piramida penduduk dengan persentase 70,7%. Kelompok usia 0-14 tahun mencapai 23,4% sedangkan kelompok usia 65 tahun ke atas mencapai 6,04%. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2016

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROSENTASE
0-4	53,123	49,680	102,803	7.84%
5-9	51,849	48,369	100,218	7.65%
10-14	53,416	50,268	103,684	7.91%
15-19	52,938	50,287	103,225	7.88%
20-24	50,836	49,069	99,905	7.62%
25-29	47,731	46,708	94,439	7.21%
30-34	57,191	57,051	114,242	8.72%
35-39	57,770	57,247	115,017	8.78%

40-44	55,100	54,136	109,236	8.34%
45-49	48,311	47,794	96,105	7.33%
50-54	40,117	40,161	80,278	6.13%
55-59	33,324	33,549	66,873	5.10%
60-64	24,077	21,083	45,160	3.45%
65-69	13,447	15,458	28,905	2.21%
70-74	8,939	11,428	20,367	1.55%
75 th ke atas	11,409	18,573	29,982	2.29%
JUMLAH	659,578	650,861	1,310,439	100%

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2017

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Indikator Tujuan

1. Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Nilai Peduli Hak Asasi Manusia	77	90	78

2. Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	76,90 (Baik)	Baik

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B
2	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	6.15-6.65	6,58	6.30-6.85

5. Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemandirian infrastruktur dan konektivitas daerah;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57.5-64.8	58,30	59.5-66

6. Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,67%	5,67%	5.50-5.20%

7. Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Tingkat Kemiskinan	13,25-12,25 %	13,63%	12.75 - 11.75%

8. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.75-77.35	73,57	77.05-77.95

9. Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.

No	Indikator Kinerja	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.02-89.6	89,31	89.3-89.9

2. Indikator Sasaran

1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100% 872 dari 872 Konflik Sosial	100%

2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	56,06%	56,06%	60,60%

3. Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	40-50%	43,33% (145 Pemuda Berprestasi)	45-55%

4. Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Kelestarian Budaya	100%	100% 18 Cagar Budaya yang dilestarikan	100%

5. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP	69,72%	77.95%	73,87%

6. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017

1	Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda	2,5-3,5%	13,3 % 805 Informasi dlm 1 Thn	2,7-3,7%
2	Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)	100%	85.53%	100%

7. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	60-70%	71%	65-75%

8. Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Nilai Pangripta	B	B	B

9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat	Tindak lanjut audit internal 100%, audit eksternal 60%, dan Aduan Masyarakat 100%	audit internal 100% audit eksternal 71.98%, Aduan Masyarakat 100%	Tindak lanjut audit internal 100%, audit eksternal 70%, dan Aduan Masyarakat 100%

10. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Profesionalitas ASN	71%	75,8	72%

11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017

1	Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	10%	30% 13 Perda	12%
---	---	-----	-----------------	-----

12. Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase standardisasi pelayanan publik	50%	78,2%	B
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	CC	B (60.09)	80%

13. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Capaian Alih Media Arsip	75%	52% (25 dari 48 OPD)	80%

14. Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	17,06% (Rp.27,45 T)	36% (31.95 T)	24,12% (Rp.31,45 T)

15. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;	1-13% (800-900 Milyar)	Rp.715 M	13-25% (900-1000 Milyar)

16. Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk bereksprosi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Apresiasi Wisata	0,16%	5,01%	0,18%

17. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn	202.21 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn

18. Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	4,2-42,4%	4.78%	4,25-42,45%

19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Kualitas Air Sungai	47.3-51.5	49.01	51.5-55.75
2	Indeks Kualitas Udara	72.25-75	68	75-79

20. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31 % Jalan	83,31 %	84,81% Jalan
2	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir	25%	24,50 %	37%
3	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	15,23%	15,23 %	25,23%
4	Persentase Akses Air Bersih/Minum	65.95%	61,95%	75.95%
5	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100%

21. Memperkuat konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Rasio Konektivitas Transportasi	0.26	0.26	0.28

22. Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan	100%	100%	100%

23. Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.88%	67.88%	67.90%
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	88,54%	88,54%	89%

24. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	1-5% (1.317.863,55)	12,97% 170.910.371 (US \$)	5% 1.383.756,74
2	Angka Pertumbuhan Kumulatif Industri Kecil Menengah (IKM)	0,71% (7086)	7086 IKM (0.71%)	1,42% (7136)

25. Memperkuat daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil	0,33% (189.156)	1,89% (192.091)	0,66% (189.780)

2	Angka Pertumbuhan Koperasi sehat	1,97% (310)	298	3,62% (315)
---	----------------------------------	-------------	-----	-------------

26. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,3-4,8%	5.44%	4,5-5%

27. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	10 ha	12,15 ha	10 ha
2	Persentase Rumah Layak Huni	85,64%	85,94	85,75%

28. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Pembangunan Desa	66,45	0,6208	70,90%

29. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);	83.00%	70.66%	84.00%
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98.88%	98.62%	98.96%

3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;	86.75%	86.04%	86.80%
4	Angka Rata rata lama sekolah	9.02-9.10	9.2	9.05-9.13

30. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;	115	82,46	110
2	Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;	4.15	3.44	4.12
3	Angka Usia Harapan Hidup	71.67-71.75	72 Tahun	71.70-71.80
4	Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	75%	0.78	76%

31. Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Minat Baca Daerah	1 : 6,7	1 : 6,8	1 : 6,6

32. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62.50-63.00	62,79	62.75-63.25

33. Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1.4	1.18	0.6-1.4
2	Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;	87%	81,34%	88%

3. Indikator Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Pendidikan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Jumlah lembaga kursus yang dibina	55-65%	89,11%	60-70%
2	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase PAUD yang tersertifikasi	55-65%	48,05%	60-70%
3	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98.88	98,62	98.96
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;	108.01%	103,04	108.60%
		Angka Kelulusan (AL) SD dan Sederajat;	100%	100%	100%
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD dan Sederajat;	0.03%	0,019	0.02%
		Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	97.00%	98.15	97.25%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat ;	86.75%	86.04	86.80%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat;	98.90%	101.41	98.95%
		Angka Kelulusan (AL) SMP sederajat;	100%	100%	100%
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP sederajat;	0.12%	0.09	0.11%
		Angka keberlanjutan dari SMP dan sederajat ke SMA/SMK dan Sederajat	101.08%	106.38	101.10%
		Jumlah Produktifitas Karya Tulis Siswa;	2	2	2

4	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN				
		Rasio Rombongan belajar SD dan Sederajat sesuai SPM;	71%	73.49	72%
		Rasio Rombongan belajar SMP dan Sederajat sesuai SPM;	35%	82.19	36%
		Persentase Kunjungan Pengawas;	56%	90.34	57%
		Persentase Rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	41%	46.00%	46%
5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi sertifikasi;	90%	92.55%	91%

2.3.2.2 Kesehatan;

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUS KESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu, dan Ponkesdes	59.38% Puskesmas yang dibangun, 60.81 Pustu yang dibangun	(19/32x100) 59.38% Puskesmas yang dibangun, (45/74x100) 60.81% Pustu yang dibangun, (36/250x100) 14.4% Ponkesdes yang dibangun	62.5% Puskesmas yang dibangun, 60.81 Pustu yang dibangun
2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENDIDIKAN TINGGI	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan	100	100	100
3	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN	Cakupan pelayanan nifas	91%	91,75%	92%

	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan peyanan KN lengkap	95%	94,46%	95%
		Persentase balita gizi kurang	8%	6,91%	8%
		Cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak dan remaja	70%	82,24%	72%
		Cakupan Pelayanan kesehatan lansia	N/A	68,84%	68,84%
4	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase rumah tangga ber PHBS	71	71	72
5	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase keluarga yang ber STBM	3%	3%	6%
		Persentase puskesmas yang melakukan kesehatan kerja	4%	4%	7%
		Persentase puskesmas yang melakukan kesehatan olah raga	4%	4%	7%
		Persentase TTU yang bersanitasi dasar	45%	45%	50%
6	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	91.5%	91.5%	92%
		Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	80%	80%	82%
		Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	4%	4%	6%
		Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	137	137	141
		Insiden / Angka kesakitan DBD	51	51	52

		Persentase kasus pemasangan yang ditangani	0.60%	0.60%	0.50%
7	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	Persentase puskesmas terakreditasi	34%	34%	65%
		Persentase Pustu sesuai standar	40%	37.8%	47%
		Persentase Ponkesdes sesuai standar	56%	54.2%	58%
		Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100%	100%	100%
		Persentase RS yang memiliki ijin operasional	100%	100%	100%
		Persentase penyehat tradisional terdaftar	58%	58.9%	62%
8	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan berijin	100%	100%	100%
		Persentase kefarmasian sesuai standar	65%	68.67%	70%
		Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat	50%	68.72%	55%
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	87%	87.18%	88%
		Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar	22%	25.9%	28%
9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	100	100%	100%
10	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Bed Occupancy Rate (BOR)	72,03%	77.77	72,59%

		Average Length Of Stay (LOS)	4,49 hari	4.00	4,48 hari
		Turn Over Internal (TOI)	1,75 hari	1.20	1,77 hari
		Bed Turn Over (BTO)	58,42 kali	69.00	56,37 kali
		Gross Death Rate (GDR)	74%	75.32	72%
		Net Death Rate (NDR)	45%	45.34	44%
		Cost Recovery Rate (CRR)	70%	85.48	73%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	78.13	76%
		Tingkat Kemandirian Keuangan	60%	63.00	61.5%
11	Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	50-80%	78.13	70-100%

2.3.2.3 Pekerjaan umum dan penataan ruang;

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rasio Kemantapan Jalan dibanding Luas Wilayah	0.358	0.358	0.365
2	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Ketersediaan lampu PJU	58	58	62
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31 % Jalan dan 95,38% Jembatan	83,31 % Jalan dan 95,38% Jembatan	84,81% Jalan dan 95,88% Jembatan
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana	Persentase PJU yang Menyala	75	75	80

	dan prasarana kebinamargaan				
5	Program pengendalian banjir	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Perdesaan	24.5	24.5	37.45
6	Program pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Kondisi Baik Saluran Drainase Perkotaan	64.99	64.99	66.49
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	15.23	15.23	25.23
8	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Kapasitas tampungan air waduk	63.86	63.86	63.87
9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/minum	Persentase Akses Air Bersih	65.95	65.95	75.95
10	Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah strategis	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Strategis	15	15	15
11	Program pengembangan dan pembangunan gedung negara	Jumlah Gedung Negara yang Ber IMB	5	4	10
12	Program pengaturan jasa konstruksi	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib	1	100	1
		Jumlah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung yang diterbitkan	30	14	35
13	Program perencanaan tata ruang	JUMLAH RDTR yang disusun	100	1	100

14	Program pemanfaatan ruang	Persentase Implementasi Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	75	30	80
15	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Ijin Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	20	94,92	40

2.3.2.4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program lingkungan sehat permukiman	Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	173.92	145,72	173.92
	Program pengembangan permukiman				
	Program pengembangan dan pengelolaan rumah umum				
	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman				
2	Program pengembangan rumah swadaya	Persentase Rumah Layak Huni	85.64	85,94	85.64
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Jumlah Rumah Tangga Pengakses Fasilitas Air Limbah Komunal	4750	4750 RT	4750

2.3.2.5 Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana	45-55	34/66 Desa Tangguh x 100	50-60
2	Program Kedaruratan Dan Logistik	Persentase Penanganan Kedaruratan dan	100	100%	100%

	Penanggulangan Bencana	Penyaluran Logistik (Terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n)			
3	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana (Terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n)	100	100%	100%

2.3.2.6 Sosial

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pemberdayaan fakir miskin, komunikasi adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya	Rasio penanganan terhadap jumlah PMKS	6	5,44	5,55
2	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rasio penanganan penyandang disabilitas	0.02	1,82%	0.025
4	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	Persentase Fasilitas Panti Asuhan Anak, Legiun Veteran dan TMP	47.73	11,36%	47.73
5	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Rasio penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial	0.25	1,37%	0.25
6	Program pemberdayaan kelembagaan	Jumlah Inisiasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0	Inisiasi lembaga LK3 dilaksana	0

	kesejahteraan sosial			kan mulai tahun 2017	
7	Program pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Persentase Fasilitasi Taman Makam Pahlawan	100	100%	100%

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.7 Tenaga Kerja

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan kualitas tenaga kerja	Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	30	30	100
		Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	360 pencaker dan 200 santri	361 Pencari Kerja dan 200 Santri	360 pencaker dan 200 santri
2	Program peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.84%	67,84%	67.86%
3	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Rata rata cakupan Pencari Kerja	9,20%	2000-250 1	9,29%
4	Program informasi pasar kerja dan peningkatan produktifitas	Persentase Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	2000-250 0	9,20%	2000-250 0

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan kualitas hidup	Persentase cakupan perempuan dan anak korban	11.35	100%	100%

	dan perlindungan perempuan dan anak	kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (p2t-p2a);		(300 pengaduan)	
2	Program pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan daerah	1.06	32%	≥30%

2.3.2.9 Pangan;

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Inisiasi Data	Pemetaan Kerawanan Pangan dilaksanakan mulai tahun 2017	4 Kecamatan
		Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	85.50%	113,70%	86.00%
2	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	72%	81,82%	73%

2.3.2.10 Pertanahan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Fasilitasi sertifikasi asset tanah Pemerintah Daerah	N/A	100%	100%

2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN	Persentase Fasilitasi Tanah yang dibebaskan	N/A	100%	100%
---	--	---	-----	------	------

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Uji Kualitas Lingkungan Hidup oleh Laboratorium Lingkungan Hidup	490	490	510
2	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Pencemaran Air	IPU 72.25-75 dan IPA 47.3-51.5	IPU 75% IPA 51.5%	15,35%
3	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam				
4	Program peningkatan pengendalian polusi				
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)	Ratio ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah perkotaan	15,35%	15.48%	100
6	Program pengelolaan laboratorium lingkungan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Lanoratorium Lingkungan	100	100%	490
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Peningkatan cakupan pengangkutan sampah	47	47	60

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Indikator Program	2016	Target
----	---------	-------------------	------	--------

			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Prosentase kepemilikan KTP-el	69.72	111.8%	73.87%
		Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	KIA dilaksanakan mulai tahun 2017	22.22%
2	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 - 18 th.	77.01	84,83	86.92%
3	Program peningkatan pengelolaan informasi dan inovasi administrasi kependudukan	Persentase arsip Akte Kelahiran yang dialih media	20	16,79	34.34%
		Persentase Validasi Data Ganda dan Anomali	20	25,73	35%
4	Program peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83	83%	83.5%

2.3.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;	50	61,23%	50
2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Indeks Pembangunan Desa	66.45	0,6208	66.45
3	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Ketersediaan data potensi desa	50	83,98	50
4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase fasilitasi badan usaha milik desa (bumdes) dan badan usaha bersama milik desa (bumades)	50	85,59	50

2.3.2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	11.35	19.01%	10.35
2	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 5tahun;	1.06	.86%	1.05
3	Program Pengendalian Penduduk	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan;	25	20.12	25

2.3.2.15 Perhubungan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Angkutan Umum) (Unit)	0.14% 100	0,128%	0.13% 100
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Jumlah ruas Jalan yang terlayani angkutan dibanding ruas jalan	0	100%	0
		Ketersediaan Angkutan Massal	0.14%	Angkutan missal mulai tahun 2017	0.13%
		Persentase Cakupan Angkutan Penyeberangan	60.75%	61,97%	66.82%
3	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Ketersediaan Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan	100% (4)	9 Dokumen	100% (9)

		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte Angkutan)	6	6	10
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Terminal Angkutan)	3	3	3
4	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	100%	100%
5	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Ketersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten;			
		Rambu Lalin (unit)	1469	1.473 Unit	1.504
		Marka Jalan (m2)	500	1.619 m2	900
		APILL (unit)	76	83 Unit	95
		Jumlah Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	3	3 Lokasi	5 Lokasi

2.3.2.16 Komunikasi Dan Informatika

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pengembangan E-Government	Jumlah Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik Pemkab.Gresik	58 SKPD 25 UPTD	100%	58 SKPD 30 UPTD
		Kecepatan Akses Internet untuk Perkantoran Pemerintahan;	150	100%	200 Mbps
2	Program Kerjasama Informasi	Cakupan Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish;	745 Informasi	100%	781 Informasi

2.3.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Program	Indikator Program	2016	Target
----	---------	-------------------	------	--------

			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah Kumulatif Pertumbuhan usaha mikro dan kecil	189,156	192.091 UKM	189,156 UKM
2	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Kumulatif Pertumbuhan Anggota Koperasi	139911	140.446 koperasi	139.911 koperasi

2.3.2.18 Penanaman Modal

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan iklim, promosi dan data dan informasi penanaman modal	Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi penanaman modal	3 Paket	3 Paket	3 Paket
2	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya	75	99.82	75
3	Program pelayanan perizinan usaha dan perizinan tertentu	Persentase Penyelesaian Izin Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	75	98.75	75
4	Program pelayanan perizinan tata ruang, bangunan dan lingkungan	Persentase Penyelesaian Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	75	86.43	75

2.3.2.19 Kepemudaan dan Olah Raga

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif;	26 Organisasi	27 Organisasi	26 Organisasi Kepemudaan
2	Program peningkatan upaya penumbuhan	Jumlah peningkatan kapasitas kepemudaan;	110 Wirausahawan muda	120 Wirausahawan muda	120 Wirausahawan muda

	kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda				
3	Program pembinaan dan masyarakat, pengembangan kebijakan dan manajemen, peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase fasilitasi terhadap cabang olahraga berprestasi	10-20% Cabor	30 Cabor	32 Cabang Olahraga

2.3.2.20 Statistic

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH	Presentase Ketersediaan Data Report Based dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%

2.3.2.21 Persandian

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah	Persentase Cakupan Pengamanan Informasi yang Dikecualikan milik Pemerintah Daerah.	100%	100%	100%

2.3.2.22 Kebudayaan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100% (18)	19 KaLi	19 Kali
2	Program pengembangan nilai budaya dan kerjasama	Persentase fasilitasi terhadap Cagar Budaya	100% (5)	38 Buah	5 Cagar budaya yang dilestarikan

	pengelolaan kekayaan budaya				
--	--------------------------------	--	--	--	--

2.3.2.23 Perpustakaan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Rasio koleksi buku dan jumlah pemustaka	0.08 -0.16	0,57	0.08 -0.16 Judul buku/Oran g

2.3.2.24 Kearsipan.

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH	Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	100%	100%	100%

C. Urusan Pilihan

2.3.2.25 Kelautan dan Perikanan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	19714.47 TON	18786.01 Ton	
2	Program pengembangan budidaya perikanan	Produktivitas lahan tambak, air payau, dan air tawar (ton)			
		a. Air Payau	289	290.33 Ton	292
		b. Air Tawar	335	392.09 Ton	339
		c. Produktivitas Garam	5250	4,500 Ton	5512
3	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)	32.17	33,89 kg.kapita /tahun	32.34 kg.kapita/t ahun
4	Program pengelolaan wilayah pesisir	Persentase Kemantapan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan			
		a. Saluran tambak	46.5	46.5	48

	dan pulau-pulau kecil (wp3k)	b. Tempat Pendaratan Ikan	25	25	30
		c. Tambatan perahu	25	25	30

2.3.2.26 Pariwisata

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	3,112,278 Orang	3.262.641 Orang	3,117,278 Orang
2	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitas terhadap Obyek dan Potensi Destinasi Wisata	5	9	5
3	Program pengembangan kemitraan	Ketersediaan Ruang Ekonomi Kreatif;	25	25	25

2.3.2.27 Pertanian

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pemberdayaan kelompok tani	Jumlah Fasilitas Keberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	208	208	228
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan	Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian	30	30	45
3	Program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura	Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura	0.64	0,66	0.62
4	Program peningkatan produksi pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Pangan dan Hortikultura	661,550	660.864	664,963
5	Program peningkatan produksi perkebunan	Jumlah produksi komoditas Unggulan Perkebunan	142,280	161.056	142,283

6	Program perlindungan tanaman perkebunan	Persentase Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan;	120	5,35%	153
7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan/ peternakan lapangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh	242	120	282
8	Program pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan/ peternakan	Jumlah fasilitasi infrastruktur pendukung pertanian	60%	242	65%
9	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase Penangan Penyakit Ternak;	14,707,8 89.81	79,87	14,814,335
11	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	5.44	14.726.6 10	5.35
12	Program peningkatan kualitas bahan baku	Cakupan Varietas Bahan Baku nikotin Rendah	7-12	Identifikasi Varietas Bahan Baku nikotin rendah diidentifikasi tahun 2017	9-14

2.3.2.28 Kehutanan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya yang ditetapkan	100%	Kab. Gresik belum memiliki Tahura	

2.3.2.29 Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	Persentase Fasilitas terhadap Pengembangan Energi Terbarukan	100%	Urusan ESDM diampu oleh Pusat dan Provinsi, Kabupaten hanya dalam pemanfaatan langsung panas bumi. Berdasarkan riset, Bagian SDALH (SKPD Lama), pemanfaatan panas bumi belum dilaksanakan pada tahun 2016	

2.3.2.30 Perdagangan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah Pengawasan alat ukur dan tata niaga perdagangan	640 timbangan & SPBU	640 timbangan & SPBU	450
2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	1,317,863	170.910.371	44
3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pameran antar wilayah dalam maupun luar daerah	10 Pameran	36 Pameran	5 pameran
4	Program peningkatan pasar	Jumlah Fasilitas Pasar	7 Pasar	7 Pasar	7 pasar kabupaten

2.3.2.31 Perindustrian

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Jumlah Kumulatif Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	240	7086 IKM	370

2	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Komulatif Sentra IKM	7086	104 SENTRA IKM	6.987
3	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah Komulatif IKM yang dibina	104	240 IKM	106

D. Urusan Penunjang

2.3.2.32 Sekretariat Daerah

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
2	Program penataan peraturan perundang-undangan	Produktivitas Pengesahan dan penetapan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%
3	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis kesejahteraan rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
4	Program fasilitasi kehumasan daerah	Persentase Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;	100%	100%	100%
5	Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai	Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik	100%	100%	100%
6	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pembangunan daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
7	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis	Persentase Fasilitasi Kebijakan Strategis	100%	100%	100%

	perekonomian daerah	Perekonomian Daerah			
8	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis SDA LH	100%	100%	100%
9	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik (Kategori sangat baik)	100%	100%	100%
10	Program peningkatan kualitas tata laksana dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB dengan nilai B ke atas);	100%	100%	100%
		Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	100%	100%	100%
11	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%	100%	100%
12	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%
13	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase fasilitasi peningkatan disiplin Aparatur	100%	100%	100%
14	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan, aset, dan barang daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	100%	100%	100%
15	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan pelayanan pengadaan barang/jasa daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	100%	100%	100%

16	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
17	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	100%

2.3.2.33 Sekretariat DPRD

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	10 Perda	100% (12 Perda)	10 Perda
2	Program fasilitasi pelaksanaan hubungan DPRD dengan masyarakat	Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	100	100%	100%

2.3.2.34 Perencanaan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis	100	100	100
		Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD	70	70	75
2	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi	100	100	100
3	Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100	100	100

4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH	100	100	100
---	--	---	-----	-----	-----

2.3.2.35 Penelitian dan Pengembangan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program penelitian dan pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100	100	100
2	Program pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100	100	100

2.3.2.36 Keuangan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	Persentase Penyusunan APBD	100	100%	100
2	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100	100%	100
3	Program peningkatan pendapatan pajak daerah	Persentase Cakupan Pendapatan Pajak Daerah	65-75	46,6%	65-75
4	Program peningkatan pendapatan pbb dan bphtb	Meningkatnya Pendapatan PBB dan BPHTB	5-15%	PBB 76 M BPHTB 144 M	5-15%
5	Program peningkatan pelayanan dan intensifikasi penerimaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	15-20%	412 M	15-20%

6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset dan barang daerah	Persentase Akurasi data barang milik daerah	75	75	75
---	---	---	----	----	----

2.3.2.37 Inspektorat

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	100%	100%	100%
2	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%
3	Program penguatan pengawasan daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP SKPD	100%	100%	100%

2.3.2.38 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	64	99,98	66
		Persentase Pejabat Struktural yang telah memiliki sertifikat diklat PIM sesuai dengan jenjangnya	70	104,64	79
2	Program pembinaan dan kesejahteraan aparatur sipil Negara	Persentase jumlah ASN yang disiplin	100	99,74	100

3	Program mutasi dan kepangkatan aparatur sipil negara	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan analisa Jabatan	100	100	100
		Rasio Jabatan struktural yang terisi	100	92,82	100
4	Program data formasi dan pengembangan aparatur sipil Negara	Persentase tingkat validitas data aparatur sipil Negara	100	100	100
		Persentase Jumlah ASN dengan kebutuhan	67	93,18	69

2.3.2.39 Kecamatan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	78%	78%	81%
2	Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	76%	76%	81%
3	Program koordinasi pengelolaan keuangan, aset dan perekonomian desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	75%	75%	80%
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	75%	75%	80%
5	Program koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi	75%	75%	80%

		Pembangunan Kecamatan			
--	--	--------------------------	--	--	--

2.3.2.40 Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2016-2021, memperhatikan RKP Tahun 2018 yang berpedoman pada RPJMN Tahun 2014–2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan ini, dapat menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal dan mamacu inovasi teknologi yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas, dapat berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima masyarakat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prasyarat pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

pembiayaan. Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diharapkan tingkat inflasi dapat dijaga pada tahun 2018.

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.

Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Disisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan skill bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan demikian, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusi dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui (1) dampak pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi, (2) pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan.

Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Selain kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

didukung oleh kebijakan UKM untuk pengembangan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal.

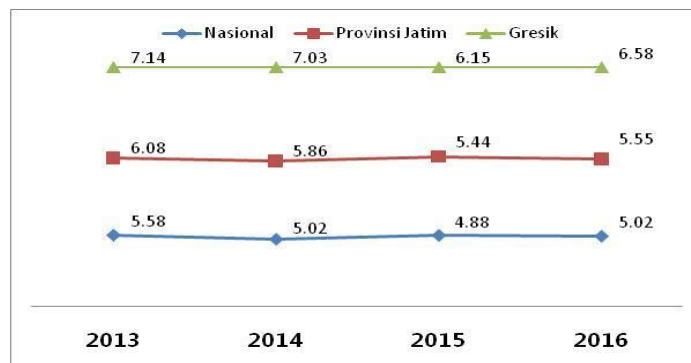
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik

Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen. Posisi relatif perbandingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.1
Pertumbuhan
Ekonomi Kab.
Gresik, Jawa
Timur dan
Nasional Tahun
2013-2016

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2016

lapangan usaha yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya. Berikut Laju Pertumbuhan PDRB 2010 Menurut Lapangan Usaha menurut Gresik Dalam Angka Tahun 2016.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha

NO	URAIAN	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.18	5.92
2	Pertambangan dan Penggalian	9.41	5.94
3	Industri Pengolahan	6.98	5.42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.46	-0.99
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.42	4.96
6	Konstruksi	8.45	13.13
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.66	8.19
8	Transportasi dan Pergudangan	5.90	5.96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.10	8.56
10	Informasi dan Komunikasi	6.58	6.53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.15	7.09
12	Real Estate	6,41	5,27
13	Jasa Perusahaan	8,55	6,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,20	6,16
15	Jasa Pendidikan	6,97	7,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,64	7,13
17	Jasa lainnya	5,09	5,59

Sumber : GDA Kabupaten Gresik 2016

3.1.1.2 Kinerja Perdagangan

Angka pertumbuhan nilai ekspor Barang/Komoditi Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebesar 12,97% 170.910.371 (US \$). Pertumbuhan ini diperoleh dari sebesar selisih nilai ekspor Barang/Komoditi Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 yang mencapai 1.488.711.070 US \$ dibandingkan nilai ekspor Barang/Komoditi Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 sebesar 1.317.800.699 US \$.. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh Meningkatnya jumlah eksportir di Kabupaten Gresik; meningkatnya permintaan importir untuk komoditi tertentu; meluasnya segmen pasar luar negeri eksportir di kabupaten gresik; dan adanya regulasi dari pemerintah yang memudahkan para eksportir dalam mengekspor komoditinya (bebas terbatas)

Angka Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Gresik sebesar 0,71%. Angka ini diperoleh dari kenaikan jumlah IKM di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 7086 IKM dari tahun sebelumnya sebanyak 7036 IKM.

3.1.1.3 Kinerja Investasi

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara dramatis pada Tahun 2016 mencapai 31,95 Trilyun dengan realisasi investasi mencapai Rp8.506.993.600.000 atau 8,5 Trilyun. Realisasi investasi tersebut memiliki komposisi 3.982.980,6 (juta rupiah) atau 46,82% berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 348.001 (US\$ ribu) dengan kurs tengah rupiah Rp13.000 mencapai 4.524.013 (juta rupiah) atau 53,18% berasal dari Penanaman Modal Asing. Adapun rasio realisasi mencapai 50,9% dari total rencana investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sebesar 16.718.565,5 (juta rupiah)

Capaian positif investasi Gresik diluar trend siklus bisnis nasional yang melemah sebagaimana ditunjukkan pelemahan nilai rupiah hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

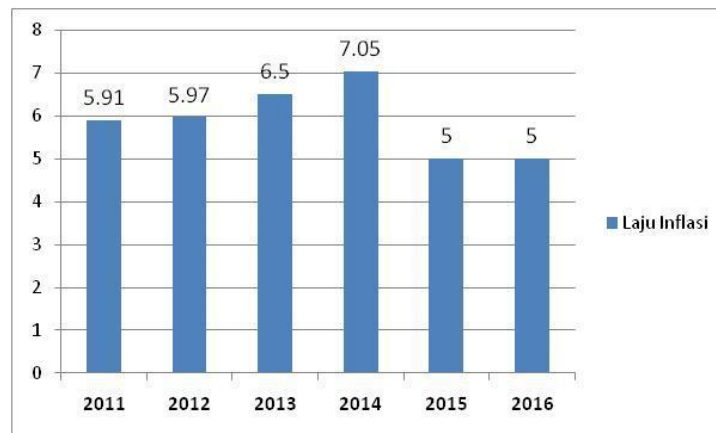
penurunan kapitalisasi indeks harga saham gabungan. Rincian investasi Kabupaten Gresik selama tahun 2016 meliputi Rencana Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) sebesar 13.952.621,8, Rencana Investasi Penanaman Modal Asing (US\$ ribu) sebesar 212.764,9, Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) sebesar 3.982.980,6, dan Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing (US\$ ribu) sebesar 348.001.

3.1.1.4 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik pada tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi yang terendah terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yaitu 5 sedangkan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 7.05. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar Sebagai Berikut :

Gambar 3.2

Laju Inflasi Kab. Gresik Tahun 2011-2016



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2016

3.1.1.5 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian global dan domestik serta kebijakan pemerintah, maka proyeksi makro ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2017 akan konsisten dengan target pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 9 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai 6,58 % pada Tahun 2016 dan diproyeksikan pada Tahun 2017 sebesar 6.30-6.85.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Gresik

Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, Perekonomian Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,58% pada tahun 2015. Kondisi secara year on year melambat akibat resesif ekonomi global sebanyak 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya (Tahun 2014) sebesar 7,03%. Akan tetapi, ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur dan nasional, pertumbuhan ekonomi Gresik selalu tumbuh di atas rerata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 0,71 basis point bahkan nasional sebesar 1,36 basis point. Pelemahan ekonomi nasional yang berdampak pada pelemahan ekonomi regional selaras dengan pelemahan mata uang rupiah terhadap US Dollar yang sempat mencapai level tertinggi pada Rp.14.772 pada awal oktober Tahun 2015 sebagaimana digambarkan pada grafik berikut;



Sumber data: Indonesia Investment Tahun 2017

Gambar 3.7

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan ekonomi nasional pada Tahun 2016 semakin membaik meskipun kinerja perekonomian masih dibawah target kinerja. Stimulus fiskal masih terbatas sejalan dengan penyesuaian belanja pemerintah pada semester II Tahun 2016. Dari sisi eksternal, masih Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

lemahnya ekonomi dan perdagangan dunia mengakibatkan perbaikan ekspor riil masih tertahan, meski harga beberapa komoditas ekspor mulai membaik. Secara keseluruhan, hingga kuartal ke-3, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara year on year dari Tahun 2015 mencapai 4,79% meningkat menjadi 5,04%. Kondisi perekonomian nasional selaras dengan konstelasi lokal dimana pertumbuhan ekonomi Gresik mencapai 6,58%

Dalam konteks pembangunan manusia, pada tingkat kemiskinan, penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Kemiskinan absolut pada Tahun 2016 mencapai 28 juta penduduk sedangkan nilai kemiskinan relatif sebesar 10,9% dari total populasi. Kondisi ini mengalami penurunan yang tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,2 basis poin kemiskinan relative dan sekitar 1 juta penduduk. Kondisi ini selaras dengan pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik berdasarkan publikasi BPS mencapai 13,63% persen dibandingkan total populasi atau meningkat tipis tidak lebih dari 1 (satu) basis point dibandingkan tahun sebelumnya.

Ditinjau dari tingkat pengangguran, perkembangan pengangguran di tingkat nasional pada tahun 2016 mencapai 7-8 juta orang atau 5,61%, kondisi ini membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,18%. Sedangkan kondisi tingkat pengangguran Kabupaten Gresik fluktuatif dipengaruhi kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang didominasi oleh sektor manufaktur, mobilitas penduduk masuk yang semakin memperketat persaingan, perubahan standar kompetensi dan skill yang dibutuhkan, serta bentuk investasi yang cenderung padat modal. Berdasarkan kondisi ini, tingkat pengangguran Kabupaten Gresik mencapai 5,67%.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Tabel 2.15
Realisasi dan Proyeksi/TargetPendapatan Kabupaten Gresik
Tahun 2015 s.d tahun 2019

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2018	Proyeksi /Target pada Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah					
1.1.1	Pajak daerah	450,326,075,139.76	412,112,744,756.71	549,739,145,000.00	499,500,013,000.00	755,910,496,000.00
1.1.2	Retribusi daerah	117,641,024,546.20	77,108,109,540.65	165,928,872,000.00	130,000,006,000.00	248,701,343,000.00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	25,234,376,050.50	15,393,353,604.09	11,547,533,000.00	11,500,002,000.00	13,284,350,000.00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	206,683,394,366.57	210,866,730,289.71	222,445,955,000.00	232,277,640,000.00	383,333,477,000.00
1.2	Dana perimbangan					
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	119,825,600,654.00	149,468,790,396.00	184,818,444,461.00	190,440,360,000.00	299,842,663,000.00
1.2.2	Dana alokasi umum	873,265,959,000.00	923,469,024,000.00	923,469,024,000.00	951,559,640,000.00	1,229,137,271,000.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	110,844,780,000.00	263,751,189,347.00	320,180,699,000.00	339,124,568,500.00	749,392,333,000.00

1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
1.3.1	Hibah	780,671,260.00	21,439,914,873.00	0	0	1,453,759,000.00
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	169,826,577,478.00	181,169,348,862.00	214,569,000,000.00	214,569,000,000.00	308,978,796,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	343,523,352,000.00	241,940,391,000.00	314,106,205,000.00	314,107,000,000.00	429,516,158,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	18,221,803,000.00	25,356,596,500.00	25,000,000,000.00	14,000,000,000.00	1,453,759,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,436,173,613,495.03	2,522,076,193,169.16	2,931,804,877,461.00	2,897,078,229,500.00	4,453,483,132,000

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Gresik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), dan Lain-lain pendapatan yang sah (meliputi hibah, dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya).

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2018 PAD diproyeksikan sebesar Rp873.277.661.000,00 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp499.500.013.000,00 Retribusi Daerah Rp130.000.006.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.500.002.000,00 Dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp232.277.640.000,00.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu :

a. Pajak Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut pajak diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak ada 10 (sepuluh) jenis, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak Daerah di APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 diperkirakan akan mencapai Rp.499.500.013.000,00.

b. Retribusi Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut retribusi daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sumber-sumber penerimaan retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah 6 (enam) jenis Retribusi Jasa Umum, 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Usaha dan 3 (tiga) jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah di APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 diperkirakan akan mencapai Rp130.000.006.000,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah (BUMN). Bagian laba atas penyertaan modal meningkat sesuai dengan performa perusahaan tersebut dan jumlah penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mempunyai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Bank Gresik), PT. Bank Jatim, dan PT BPR Jatim. Hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2018 diperkirakan sebesar Rp.11.500.002.000,00.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan Dana Kapitasi FKTP dan Tindak Lanjut Penghapusan Aset

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 diperkirakan akan mencapai Rp.232.277.640.000,00.

3.2.2.2 Dana Perimbangan

Selain dari PAD salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2018 dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.481.124.568.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada Tahun Anggaran 2018 diperkirakan akan mencapai Rp190.440.360.000,00.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Daerah yang bersifat "*Block Grant*" dan besarnya ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

sekurang-kurangnya 25% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Perkiraan pendapatan Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2018 akan mencapai Rp.951.559.640.000,00.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Untuk kriteria teknis dirumuskan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana-prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Perkiraan pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp339.124.568.500,00.

3.2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Bagi Hasil Propinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT), Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3) dan Dana Bagi Hasil Lainnya yang berasal dari Retribusi IMTA, Retribusi TERA, Retribusi Pemakaian dan Pengujian Hasil Hutan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Perkiraan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 akan mencapai Rp542.676.000.000,00.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.624.246.765.393,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp1.479.908.080.738,00. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif, dengan menitik beratkan pada :

1. Prioritas pembangunan daerah dan program unggulan;
2. Program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (rutin);
3. Program urusan wajib dan urusan pilihan;
4. Program Urusan Penunjang , Pendukung dan Urusan Kewilayahan;
5. Program bantuan keuangan lainnya;
6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
7. Penguatan program-program penanganan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat;
8. Stimulasi pertumbuhan ekonomi (sektor riil, subsidi bunga, penjaminan kredit bagi UKMK).
9. Melanjutkan proyek strategis (*multi years project*);
10. Penanganan bencana alam dan pasca bencana alam.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terbagi dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun 2018 arah kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) ; pencarian dana cadangan ; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ; penerimaan pinjaman daerah ; penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2018 adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
 2. Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok hutang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2018 adalah :
- a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD
 - b. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman jika terjadi surplus anggaran.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2018 “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 “Peningkatan Kualitas hidup Masyarakat” Jawa Timur melalui Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Bekerlanjutan” dengan tetap memperhatikan visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, maka tema Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah :

“Gresik, City of Investment Anchorage’s”

“Gresik, Kota Berlabuhnya Investasi “

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kabupaten Gresik tersebut, maka Prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus dirumuskan secara realitis dan obyektif berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu, dalam penyusunan prioritas dan sasaran juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dan usulan musrenbang 2018.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2018 disusun mengacu pada:

a. Visi Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 yaitu:

”Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

b. Misi Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Uraian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2018 berdasarkan pengelompokan Misi pada RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui tabel matrik sebagai berikut:

Tabel 4.1
Matrik Misi Tujuan dan Sasaran

Misi Pertama : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;	
Tujuan	Sasaran
Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah;	1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat 2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran 3. Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggugah kreatifitas dalam kemandirian 4. Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan

	budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global
Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;	1. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi 2. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi. 3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif;	1. Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah. 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance 4. Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif 6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kerajinan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.
Misi Ketiga: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.	1. Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di Daerah 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah

	serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual 3. Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif; 4. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan 5. Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan
2. Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah;	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan 2. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang 3. Memperkuat konektivitas transportasi antar wilayah Gresik 4. dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan 5. Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan
3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan	1. Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta Mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan. 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan 3. Memperkuat daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif
4. Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.	1. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan

	kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh 2. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni 3. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian 4. ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera.
Misi Keempat: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	1. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan 3. Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca
4. Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender 2. Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertumbuhan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera

4.2 Prioritas Pembangunan

Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, Target RPJMD Tahun 2016-2021, evaluasi terhadap RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

tingkat daerah maupun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirumuskan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Penguatan Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
2. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar, Konektivitas Daerah, Permukiman Inklusif, Pengendalian Banjir
3. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, pengembangan Ketenagakerjaan, Kondusifitas Daerah, Penegakan Hak Asasi Manusia, &Pengarustamaan Gender
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan didukung Sistem Inovasi Daerah
6. Kemandirian Desa.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas	No	Program Prioritas
Penguatan Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan	1	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
	2	Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
	3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	4	Program Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga
	5	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	6	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional
	7	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
	8	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
	9	Program Pendidikan Non Formal
	10	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Ketersedian Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar, Konektivitas Daerah, Permukiman Inklusif, Pengendalian Banjir	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	5	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
	6	Program Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis
	7	Program Pengembangan dan Pembangunan Gedung Negara
	8	Program Pengendalian Banjir
	9	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum
	13	Program Lingkungan Sehat Permukiman
	14	Program Pengembangan Permukiman
	15	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Umum
	17	Program Pengembangan Rumah Swadaya
	18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	19	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan	1	Program Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu
	2	Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal
	3	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan
	4	Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah
	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah
	6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	7	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
	8	Program Peningkatan Pendapatan Pbb Dan Bphtb
	9	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Horikultura
	10	Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura
	11	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
	12	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan
	13	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
	14	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	15	Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, pengembangan Ketenagakerjaan, Kondusifitas Daerah, Penegakan Hak Asasi Manusia, &Pengarustamaan Gender	1	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	3	Program Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas
	4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	7	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	8	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
	9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
	10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan didukung Sistem Inovasi Daerah	1	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
	3	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan
	4	Program Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
	5	Program Pengembangan E-Government
	6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	7	Program Penelitian Dan Pengembangan
	8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	10	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kemandirian Desa.	1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	2	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Penjelasan lebih lanjut tentang indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 yang meliputi indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

a. **Indikator Kinerja Tujuan**

1. Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah;

No	Indikator Tujuan	Target
		2018
1	Nilai Peduli Hak Asasi Manusia	79

2. Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;

No	Indikator Tujuan	Target
		2018

1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	BAIK
---	--	------

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif;

No	Indikator Tujuan	Target
		2018
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2	Nilai Opini BPK	WTP

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah;

No	Indikator Tujuan	Target
		2018
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	6.45-6.95

5. Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah;

No	Indikator Tujuan	Target
		2018
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.5-68.2

6. Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan;

No	Indikator Tujuan	Target
		2018
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5.35-5.05%

7. Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu;

No	Indikator Tujuan	Target
		2018
1	Persentase Tingkat Kemiskinan	12.25 - 11.25%

8. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan;

No	Indikator Tujuan	Target
		2018
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.35-78.55

9. Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.

No	Indikator Kinerja	Target
		2018
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.6-90.2

b. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja sasaran disusun menurut urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi SKPD. Rincian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%

2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	71,2 %

3. Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	50-60%

4. Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Kelestarian Budaya	100%

5. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP	76.67%

6. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda	2,9 - 3,9%
2	Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)	100%

7. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	70-80%

8. Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah.

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Nilai Pangripta	B

9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat	Tindak lanjut audit internal 100, audit eksternal 80%, dan Aduan Masyarakat 100%

10. Meningkatkan kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Indeks Profesionalitas ASN	73%

11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	14%

12. Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase standardisasi pelayanan publik	70%
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	B

13. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola keraspian berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Capaian Alih Media Arsip	85%

14. Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	51,17% (Rp35,45T)

15. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;	25-50% (1000-1200 Milyar)

16. Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Apresiasi Wisata	0,20%

17. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn

18. Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	4,27-42,47%

19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Indeks Kualitas Air Sungai	55.75-60
2	Indeks Kualitas Udara	79-83

20. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	86,11% Jalan
2	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir	50%
3	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	35,23%

4	Persentase Akses Air Bersih/Minum	85,95%
5	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%

21. Memperkuat konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Rasio Konektivitas Transportasi	0,30

22. Menwujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan	100%

23. Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,92%
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	89,42%

24. Menwujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	13,4% (1.494.457.28)
2	Angka Pertumbuhan Kumulatif Industri Kecil Menengah (IKM)	2,13% (7186)

25. Memperkuat daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Angka Pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil	0,99% (190.407)
2	Angka Pertumbuhan Koperasi sehat	5,26% (320)

26. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, <i>eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas</i>	4,7-5,2%

27. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	15 ha
2	Persentase Rumah Layak Huni	85,86%

28. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Indeks Pembangunan Desa	74,35%

29. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan

No	Indikator Sasaran	Target
----	-------------------	--------

		2018
1	Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);	85.00%
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	99.02%
3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;	86.83%
4	Angka Rata rata lama sekolah	9.08-9.16

30. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;	105
2	Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;	4.10
3	Angka Usia Harapan Hidup	71.75-71.85
4	Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	77%

31. Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Indeks Minat Baca Daerah	1 : 6,4

32. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender;

No	Indikator Sasaran	Target
		2018
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	100%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.00-63.50

33. Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.

No	Indikator Sasaran	Target
		2018

1	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1..4
2	Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;	89%

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dan/pagu indikatif, catatan penting serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi capaian kerja dan kebutuhan pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana program dan kegiatan prioritas seluruh SKPD.

RKPD 2018 Kabupaten Gresik merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2016 dan proyeksi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan untuk dapat memecahkan permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

Rencana penganggaran belanja tahun 2018 dipergunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun rincian Belanja Langsung Prioritas dari masing-masing SKPD sebagaimana pada **Lampiran I.**

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan kepada Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga. Rincian Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada **Lampiran II.**

Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Lampiran I dan II merupakan Belanja Prioritas. sedangkan Belanja yang belum Prioritas sebagaimana dalam *Lampiran Berita Acara MUSRENBANG KABUPATEN*.

Tabel V.1
Rincian Belanja Langsung SKPD
Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	Pagu Anggaran 2018
1	Dinas Pendidikan	Rp131.022.516.000
2	Dinas Kesehatan	Rp152.780.757.000
3	RSUD Ibnu Sina	Rp212.862.642.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp434.248.833.000
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp38.102.317.000
6	Dinas Polisi Pamong Praja	Rp15.656.938.723
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 4.045.765.000
8	Dinas Sosial	Rp8.220.980.000
9	Dinas Tenaga Kerja	Rp9.396.252.000
10	Dinas Pertanahan	Rp39.305.907.218
11	Dinas Lingkungan Hidup	Rp29.361.607.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp11.245.552.000
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp.6.908.213.000
14	Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan	Rp.8.654.644.000
15	Dinas Perhubungan	Rp23.676.784.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp4.857.923.000
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Rp18.861.377.000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp7.979.933.000
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp17.251.203.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp6.190.781.000
21	Dinas Perikanan	Rp12.009.096.200
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp9.338.224.000
23	Dinas Pertanian	Rp.15.525.430.000
24	Inspektorat	Rp10.498.322.000
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah	Rp14.813.907.000

No	SKPD	Pagu Anggaran 2018
26	Badan Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp25.159.803.000
27	Badan Kepegawaian Daerah	Rp26.206.107.000
28	Bagian Administrasi Pemerintahan	Rp5.101.329.000
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp6.498.791.000
30	Bagian Program Pembangunan	Rp2.013.439.000
31	Bagian Perekonomian dan SDA	Rp2.211.412.000
32	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp1.414.650.000
33	Bagian Hubungan Masyarakat	Rp5.839.807.000
34	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp3.053.352.352
35	Bagian Umum	Rp59.716.738.000
36	Bagian Keuangan	Rp2.303.304.000
37	Bagian Hukum	Rp3.374.974.000
38	Sekretariat DPRD	Rp71.032.890.000
39	Kecamatan Gresik	Rp4.703.176.000
40	Kecamatan Kebomas	Rp3.204.210.286
41	Kecamatan Manyar	Rp699.750.000
42	Kecamatan Cerme	Rp699.751.000
43	Kecamatan Benjeng	Rp699.750.000
44	Kecamatan Balongpanggang	Rp.699.749.000
45	Kecamatan Duduksampeyan	Rp689.750.000
46	Kecamatan Driyorejo	Rp699.753.959
47	Kecamatan Wringinanom	Rp 915.061.000
48	Kecamatan Kedamean	Rp 699.750.000
49	Kecamatan Menganti	Rp699.751.000
50	Kecamatan Sidayu	Rp699.750.000
51	Kecamatan Ujungpangkah	Rp699.748.000
52	Kecamatan Panceng	Rp721.113.000
53	Kecamatan Bungah	Rp699.751.000
54	Kecamatan Dukun	Rp.699.751.000

No	SKPD	Pagu Anggaran 2018
55	Kecamatan Sangkapura	Rp807.406.000.00
56	Kecamatan Tambak	Rp797.396.000.00
57	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.3.630.213.000
JUMLAH		Rp1.479.908.080.738,00

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2018 yang menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, isu-isu strategis bertaraf lokal, regional, nasional hingga global. RKPD Tahun 2018 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 secara yuridis didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sedangkan secara substansial dalam penyusunan RKPD ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dan memperhatikan Peraturan Bupati Gresik tentang Perubahan tidak Mendasara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 serta mengintegrasikan kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan,

Forum SKPD hingga Musrenbang Kabupaten yang berfungsi sebagai forum untuk menjaring aspirasi, penyelarasan, dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Adapun Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan bagi masing-masing SKPD untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 menjadi Rencana Kerja SKPD Tahun 2018.
2. Dalam rangka konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran daerah maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa, maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun atau review RPJM Desa dan RKPDesa Tahun 2018.
4. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dengan sumber pendanaan meliputi APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten, partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana

tertuang pada Rencana RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 memiliki akses secara terbuka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan progam/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melakukan pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018, Pengendalian pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 dan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016.

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T.,M.Si.